



# MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

KALEIDOSKOP



# Daftar Isi



Pada edisi Kaleidoskop ini, kami mencoba merekam berbagai peristiwa, *highlight* pemberitaan, dan penerimaan *award* di Kementerian Keuangan dalam waktu setahun terakhir. Rekaman itu, kami gambarkan dalam objek kaset pita di halaman cover. Alasannya, kaset adalah salah satu media penyimpanan yang juga merekam. Kaset menjadi salah satu senjata andalan wartawan dalam menyampaikan berita.

**MEDIA KEUANGAN** adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

**MEDIA KEUANGAN** saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



12



18



38



24



28



32

## 5 DARI LAPANGAN BANTENG

## 6 EKSPOSUR

**Diterbitkan oleh:** Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Sulistuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulisty, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S., Adya Asmara Muda, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, Budi Prayitno, Muchamad Ardani, Indratmo Kurniawan, Diah Sarkorini. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Resha Aditya Pratama, Rostamaji, Adelia Pratiwi, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Arif Nur Rokhman, Maria Cecilia Kinanti, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Andi Abdurrochim, Shinta Septiana, Ika Dewi Puspitasari, Nur Muhlisin, Aditya Arifiyanto, Intan Nur S., Ardes Martua Yudito S., Emawan Setyo P., Azharuddin Priyotomo. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Andi Al Hakim, Rhoric Andra F., Muhammad Fath Kathin, Adhi Kurniawan, Nur Iman, Agus Tri Hananto, Langgeng Wahyu Pamungkas, Arief Taufiq Nugroho, Arief Kuswanadji. **Desain Grafis dan Layout:** Arfindo Briyan Santoso, Venggi Obdi Ovisa, Victorianus M.I. Bimo, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediageuangan@kemenkeu.go.id.

*Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiutannya.*

## KALEIDOSKOP

- 10 Infografis: Peristiwa Penting 2018
- 12 Menjaga Aklimatisasi Pertumbuhan Ekonomi
- 18 Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas
- 24 Tumbuh Bersama Infrastruktur Berkeadilan
- 28 Perlu Modal Membangun Negara
- 32 Kelola Pembiayaan Untuk Kesejahteraan
- 36 Putus Rantai Perusak Generasi
- 40 Infografis: Penghargaan Tahun 2018

## LIPUTAN KHUSUS

- 43 Meramu Bekal Birokrat Milenial

## KOLOM EKONOM

- 46 Tumbuh 5 persen: Gembira atau Masygul?
- 48 APBN: Menjaga Momentum Pertumbuhan Saat Volatilitas Global

- 50 Perkuat Sinergi Dorong Perekonomian yang Solid dan Berkesinambungan

## RENUNGAN

- 53 Tidak Hanya Bermodal Passion
- Kuliner**
- 56 Menikmati Sate Kerbau di Pantura Timur

## BUKU

- 56 Meminjam Mata Na Willa untuk Melihat Dunia

## Optimis Songsong Tahun 2019

Tahun 2018 ditandai dengan banyaknya tantangan di perekonomian global akibat gejolak pemerintahan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump. Ancaman perang dagang antarnegara besar di dunia yang diikuti dengan kebijakan kenaikan suku bunga oleh bank sentral AS telah membuat tingginya gelombang perekonomian yang selama ini tenang tak beriak.

Di dalam negeri, pembangunan infrastruktur terus berlanjut. Beberapa ruas jalan tol trans Jawa dibangun agar arus mudik lebaran lebih lancar. Infrastruktur dan sarana transportasi di Jakarta dan Palembang juga dibangun untuk mendukung perhelatan Asian Games. Tahun 2018, Indonesia telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan berskala internasional, yaitu Asian Games, Asian Para Games, dan sidang tahunan IMF-WBG.

Tidak hanya pembangunan yang dilakukan, namun Indonesia juga mengalami beberapa bencana alam, seperti gempa bumi di Lombok dan Palu. Untuk itu, pada APBN 2019 telah dicadangkan antisipasi dana kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akibat bencana alam. Pemerintah juga telah membangun dan melaksanakan sistem mitigasi dan penanganan bencana yang lebih baik dan diharapkan semakin baik dari tahun ke tahun.

Terlepas dari gejolak di luar negeri dan musibah di dalam negeri, sampai dengan pertengahan Desember 2018,

APBN 2018 berjalan sangat baik. Pendapatan negara tumbuh 18,8 persen, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan negara di tahun 2017 sebesar 6,5 persen. Penerimaan perpajakan yang tumbuh rata-rata sekitar 7,6 persen dalam 5 tahun terakhir, disertai dengan peningkatan kualitas belanja, menunjukkan meningkatnya kemandirian pembangunan.

Pada sisi Belanja Negara, juga terjadi peningkatan volume realisasinya di tahun 2018 yaitu mencapai 14 persen dibandingkan peningkatan realisasi Belanja Negara di tahun 2017 sebesar 8,9 persen. Dengan pencapaian tersebut, defisit realisasi APBN tahun 2018 hingga pertengahan Desember 2018 mencapai 1,86 persen dari PDB. Angka tersebut lebih rendah dari yang direncanakan di APBN tahun 2018 sebesar 2,19 persen dari PDB. Secara otomatis, pembiayaan utang pada tahun 2018 lebih rendah dari rencana di APBN tahun 2018.

Defisit keseimbangan primer terus membaik, ditandai dengan minus Rp93,3 triliun pada tahun 2014 diharapkan dapat menjadi diperkirakan minus sekitar Rp15,4 triliun.

Dengan hasil APBN 2018 yang memuaskan, pemerintah optimis menyambut datangnya tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih akan melambat. Namun pemerintah akan senantiasa menjaga APBN agar tetap sehat sehingga berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah bersama DPR telah menyetujui untuk

menyesuaikan asumsi nilai tukar rupiah pada APBN 2019 dari Rp14.500 menjadi Rp15.000.

Tahun 2019, kebijakan fiskal yang akan dijalankan Pemerintah bertema “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”. Sejalan dengan tema tersebut, Pemerintah akan menjalankan beberapa kebijakan pokok di dalam APBN tahun 2019. Pertama, mobilisasi pendapatan akan dilakukan secara realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif.

Kedua, Belanja negara yang produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, percepatan reformasi birokrasi, serta pemantapan desentralisasi fiskal. Terakhir, efisiensi serta inovasi pembiayaan untuk memperkuat ketahanan fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah akan menyongsong 2019 dengan semangat optimisme. Pemerintah telah siap menyambut pesta demokrasi terbesar dengan mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pemilihan presiden dan anggota parlemen. Event nasional ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi bersatunya segenap putra bangsa dalam bersinergi membangun bangsa, terlepas dari siapa yang menang maupun yang kalah.

**Nufransa Wira Sakti,**  
Kepala Biro Komunikasi dan  
Layanan Informasi



## Terima Kasih

Atas kepercayaan yang diberikan, Kementerian Keuangan menjadi yang terbaik dalam Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2018:

- Juara Umum
- Juara pertama kategori website terbaik/pelayanan informasi melalui internet produk [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Juara kedua kategori penerbitan media internal (in-house magazine) produk Media Keuangan.

## HAKORDIA

**P**eringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) diselenggarakan dengan kegiatan apel khusus. Menteri Keuangan menjadi pembina upacara yang dilaksanakan di lapangan upacara kantor pusat DJBC (11/12). Upacara ini dihadiri oleh pejabat eselon I Kementerian Keuangan dan jajaran pegawai Bea dan Cukai.

Foto  
Muhammad  
Khamil





Foto  
Angga Rindra

## TRADISI MELUKAT

---

Upacara Melukat adalah upacara penyucian dan pembersihan kembali setiap diri manusia yang mempunyai sifat buruk dan kotor. Melukat yang sederhana dapat dilakukan di mata air atau aliran sungai di laut atau pertemuan laut dan sungai. Upacara yang berasal dari Bali tersebut mempersembahkan beberapa sesajen, seperti prayascita dan bayuan.



# PERISTIWA PENTING 2018



15 / 1

Peluncuran Publikasi "APBN KiTa".



17 / 1

Kunjungan kerja Menkeu, MenPUPR, dan Menhub kerja proyek pembangunan jalan tol trans sumatera, Medan.



15 / 2

Konferensi Pers Bersama Hasil Penindakan dan Pemusnahan Ponsel Ilegal dan Miras Ilegal terbesar dalam sejarah di Kantor Pusat DJBC.



4 / 4

DJP dan DJBC meluncurkan program Joint Endorsement untuk memudahkan para pelaku usaha mendapatkan pelayanan yang cepat

11 / 5

Menkeu berbicara tema "Kemana Uang Kita?" dalam talkshow interaktif We The Youth di Epicentrum XII Kuningan Jakarta.

28 / 2

Peringatan 110 tahun lelang indonesia dengan mengadakan lelang sukarela koleksi pribadi milik pejabat negara di galeri nasional Jakarta.



14 / 8



Ministry of Finance Human Capital Summit and Expo 2018

12 / 7

Penandatanganan Pokok-Pokok Kesepakatan Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan Freeport-McMoran Inc. (FCX).

23 / 5

Peringatan 10 Tahun Sukuk Negara dengan mengadakan buka puasa dan dialog bersama Ulama dan stakeholders keuangan syariah" di Aula Juanda, Jakarta.



8-14 / 10

Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-World Bank Group 2018 di Bali. Pertemuan ini dihadiri 15 ribu peserta, yang terdiri dari Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara, sektor privat, NGOs, akademisi, dan media.

27 / 8

Seminar 10 Tahun Lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).



11 / 12

Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penyerahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2019 di Istana Kepresidenan Jakarta



23 / 8

Menkeu mewakili seluruh jajaran Kementerian Keuangan memberikan bantuan gempa lombok yang berasal dari para pegawai Kemenkeu.

31 / 10

Seminar Hari Oeang ke-72 bertema "Dialog Lintas Generasi: Melanjutkan Estafet Pembangunan Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045" di Gedung Dhanapala, Jakarta



21 / 11

Sosialisasi UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di aula mezzanine Jakarta.





## Menjaga Aklimatisasi Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2018 menjadi salah satu momentum dimulainya fokus pembangunan ekonomi digital oleh pemerintah di Indonesia. Sebagai revolusi industri keempat, peran pemerintah sebagai pembuat regulasi menjadi penting agar negara tidak hanya mampu bersaing di kancah dunia, namun juga mampu memitigasi segala tantangan yang muncul. Merespons hal itu, Presiden Jokowi pada 21 Juli 2017 telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) / Road Map e-Commerce Tahun 2017-2019. Dampaknya, mesin pertumbuhan ekonomi pun mendapat imbasnya.

Foto Dok. Biro KLI    Teks Abdul Aziz

**D**i sisi lain, awal 2018 Indonesia mencatat prestasi menggembirakan dengan naiknya peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB). Hal itu menjadi tantangan pemerintah untuk menjadikan seluruh wilayah Indonesia ramah bagi investor. Laporan tahunan “Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs” yang dirilis oleh Grup Bank Dunia, menggambarkan iklim kemudahan berusaha dari 190 negara di dunia. Laporan tersebut menginvestigasi regulasi-regulasi di suatu negara yang berpengaruh dalam kemudahan atau hambatan dalam berusaha atau berbisnis.

Survei EoDB ini meliputi 10 indikator. Indikator inilah yang mencerminkan perilaku investor dalam menghadapi regulasi yang ada. Indikator dengan peringkat cukup baik yang telah diraih Indonesia antara lain kemudahan memulai usaha, kemudahan mengurus perizinan untuk mendirikan dan menggunakan bangunan komersial, kemudian melakukan jual beli dan balik kepemilikan tanah dan bangunan, kemudahan melakukan pelaporan dan pembayaran pajak dan iuran wajib, kemudahan melakukan kegiatan ekspor impor, serta kemudahan penyelesaian perkara perdata dengan nilai gugatan sederhana.

Pada EoDB 2018, Indonesia sendiri mengalami tren yang positif dalam peringkat tersebut. Tercatat selama kurun waktu enam tahun terakhir, peringkat Indonesia selalu mengalami kenaikan. Tahun 2012, peringkat EoDB Indonesia tercatat di posisi 129 dan naik ke posisi terakhir di peringkat 72 pada tahun 2018. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintahan untuk selalu memperbaiki iklim investasi di dalam negeri. Iklim investasi yang baik tak hanya akan mendorong neraca perdagangan melalui kenaikan ekspor, namun juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Mendukung hal itu, Presiden Jokowi sendiri telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada akhir tahun lalu. Dalam Perpres tersebut,

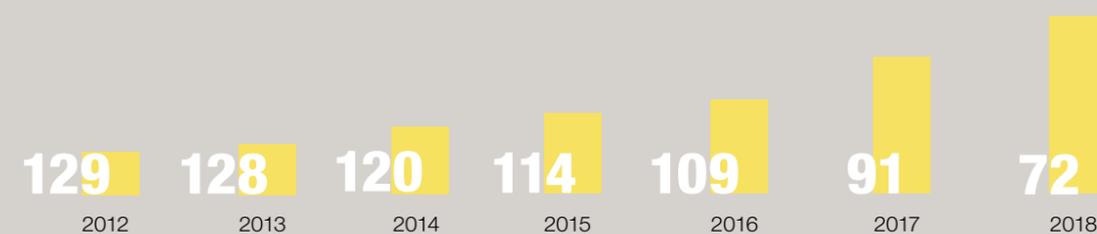
Presiden mengamanatkan pembentukan Satuan Tugas Nasional, Kementerian/Lembaga, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung percepatan pembentukan iklim investasi yang baik. Selain itu, Presiden juga mengamanatkan reformasi peraturan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan di pemerintah pusat maupun daerah agar selaras dan tidak tumpang tindih. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan menerapkan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

#### Deregulasi dan simplifikasi proses bisnis

Dalam upaya menjaga potensi dari momentum EoDB tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah melakukan berbagai macam kebijakan yang mendukung percepatan pelaksanaan berusaha. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemenkeu mencatat selama kurun waktu 2006 sampai dengan 2015, Kemenkeu telah berhasil melakukan deregulasi sebanyak 1.474 peraturan atau sekitar 61,2 persen dari total peraturan yang berlaku. Sementara itu, pada tahun 2016 terdapat 40 Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan (PMK/KMK) yang dipangkas dan meningkat pada tahun 2017 sebanyak 88 regulasi yang dipangkas. Selain deregulasi peraturan, Kemenkeu juga telah menyusun 25 PMK untuk simplifikasi proses bisnis di bawah kewenangan Kemenkeu. Pada tahun ini sendiri, Menteri Keuangan telah menandatangani PMK terbaru Nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanaan dan Cukai dalam Rangka Kemudahan Berusaha untuk mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 91 tahun 2017 pada tanggal 26 Maret 2018.

Menjelaskan dampak deregulasi dan simplifikasi tersebut, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Adriyanto, mengungkapkan bahwa realisasi investasi langsung di Indonesia pada tahun 2017 tumbuh sebesar 13,1 persen *year on year*, dimana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat mencapai Rp262,3 Triliun atau

Peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia setiap tahunnya.



tumbuh sebesar 21,3 persen *year on year*. Di sisi lain, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat mencapai Rp430,6 Triliun atau tumbuh sebesar 8,6 persen *year on year*. Terkait dengan PMA, Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa pertumbuhan realisasi PMA Indonesia pada tahun 2017 disebabkan salah satunya oleh reformasi regulasi investasi yang baik. Dalam laporan tersebut, Indonesia juga dinilai sebagai salah satu tujuan investasi potensial nomor empat setelah Amerika Serikat, Tiongkok, dan India bagi para perusahaan multinasional.

#### Kemudahan layanan

Setidaknya dari sebelas indikator EoDB yang digunakan Bank Dunia, Indonesia masih memiliki beberapa pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki. Staf Ahli Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo, menjelaskan bahwa reformasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) Kemenkeu sebenarnya sejak lama telah dilakukan. Namun, saat ini, Kemenkeu melalui DJP tengah fokus pada pemberian kemudahan Wajib Pajak mulai dari proses pendaftaran untuk *starting business*, pembayaran, pelaporan hingga pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Dari sisi pendaftaran Wajib Pajak, DJP telah melakukan terobosan dengan mempermudah pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menggunakan fasilitas database Kartu Tanda Penduduk, sehingga sudah tidak lagi memerlukan Surat Keterangan Domisili Usaha dari pemerintah daerah. Selain itu, bagi pengusaha yang ingin mengurus Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) juga dipermudah dengan pemberian kartu lebih awal, baru setelahnya diverifikasi fisik.

Dari sisi kebijakan fasilitas kepabeanaan juga ikut berperan dalam mendorong kemudahan arus barang investasi masuk dan

keluar. Untuk itu, Direktur Fasilitas Kepabeanaan, Robi Toni, menjelaskan bahwa melalui PMK Nomor 28/PMK.04/2018 tentang perubahan PMK Nomor 272 tahun 2015 tentang Pusat Logistik Berikat dan PMK Nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanaan dan Cukai dalam Rangka Kemudahan Berusaha, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga melakukan upaya perbaikan pelayanan. Dari PMK Nomor 28 tahun 2018 sendiri, DJBC melakukan peningkatan pelayanan Tempat Penimbunan Berikat yang dalam hal ini adalah Pusat Logistik Berikat (PLB) generasi II.

#### Mendongkrak mesin ekspor

Selain pertumbuhan ekonomi disokong oleh membaiknya peringkat kemudahan berinvestasi, ekonomi domestik juga dibuat cukup heboh dengan pelemahan nilai tukar Rupiah. Depresiasi yang terjadi dipicu salah satunya dari dinamika ekonomi global yang juga

merupakan imbas dari kebijakan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS The Fed. Imbas ini tak hanya berdampak ke negara berkembang saja, namun juga ke hampir semua negara.

Imbasnya salah satunya ke sektor ekspor impor Indonesia yang menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi. Nilai impor barang dan jasa yang lebih besar dari nilai eksportnya menyebabkan kondisi yang disebut defisit neraca transaksi berjalan atau *current account deficit* (CAD). Namun demikian, Indonesia masih dianggap mampu bertahan lantaran memiliki fundamental ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang lainnya.

Diwawancarai Media Keuangan beberapa waktu lalu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahazil Nazara, memaparkan di samping neraca transaksi modal dan finansial (*capital account*), neraca transaksi berjalan (*current account*) merupakan salah satu unsur pembentuk neraca pembayaran (*balance of payment*) dari suatu negara secara agregat. Dalam posisi tersebut, tren tiga tahun terakhir posisi saldo neraca pembayaran Indonesia sebenarnya memiliki saldo yang positif. Namun demikian, kekhawatiran atas laporan defisit neraca transaksi berjalan semester pertama 2018 cukup memberi kontribusi terhadap sentimen depresiasi mata uang Garuda.

#### Posisi Indonesia pada 10 Indikator EoDB

Indikator	2018	2017	Perubahan
● Memulai Usaha	144	151	- 7
● Perizinan Terkait Mendirikan Bangunan	108	116	- 8
● Penyambungan Listrik	38	49	- 11
● Pendaftaran Properti	106	118	- 12
● Akses Perkreditan	55	62	- 7
● Perlindungan Terhadap Investor Minoritas	43	70	- 27
● Pembayaran Pajak	114	104	10
● Perdagangan Lintas Negara	112	108	4
● Penegakan Kontrak			
● Penyelesaian Perkara Kepailitan	145	166	- 21
	38	76	- 38

#### Memperbaiki CAD

Dalam mengatasi depresiasi rupiah akibat defisit neraca transaksi berjalan, Suahazil menjelaskan pentingnya keterlibatan Bank Indonesia (BI) untuk melakukan kebijakan moneter sebagai kebijakan jangka pendek. Instrumen kebijakan yang bisa digunakan salah satunya melalui kebijakan suku bunga acuan.

Hal itu menjadi penting terutama dalam menanggapi kebijakan The Fed yang pada akhir September lalu menaikkan suku bunga kedua kalinya dalam tahun ini. Untuk menjaga ekspektasi pasar domestik, BI selaku otoritas moneter perlu mengatur suku bunganya melalui *7-day repo rate*.

“Kebijakan suku bunga tersebut sebagai bagian dari kebijakan moneter ditentukan secara independen oleh BI. Independen dari pemerintah,” ungkapnya.

Dalam jangka panjang, struktur perekonomian dalam negeri juga perlu untuk diperbaiki. Inilah yang menjadi tugas utama pemerintah dalam membuat kebijakan struktural ekonomi. Menurut Suahazil, berkaca dari sumber masalah defisit neraca transaksi berjalan, pemerintah perlu melakukan beberapa kebijakan struktural yang dapat mengendalikan impor dan meningkatkan ekspor.

Selain PMK 131 tahun 2018, untuk mendorong industri, investasi dan ekspor, Menkeu juga

**“Dengan menggunakan model registrasi yang lebih modern, yang lebih cepat, dengan sistem data yang terpadu, terintegrasi sehingga tidak perlu lagi melewati banyak rantai birokrasi,”**

**Joko Widodo**  
Presiden RI

menetapkan PMK 130 tahun 2018 tentang Kawasan Berikat. Peraturan ini dibentuk untuk mengatur antara lain kemudahan operasional pemasukan dan pengeluaran barang dengan memangkas 45 perizinan menjadi hanya 3 perizinan, proses pengurusan perizinan dilakukan secara *online*, kemudahan pelaksanaan subkontrak yang memungkinkan ekspor langsung dari Kawasan Berikat penerima subkontrak, dan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dari kantor pusat ke unit vertikal. Aturan ini berlaku di seluruh kawasan berikat dan akan mempengaruhi 1.372 Kawasan Berikat.

Selain insentif fiskal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga terus meningkatkan layanan kemudahan berusaha dengan cara melakukan simplifikasi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat dan KITE serta memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan dalam melakukan registrasi kepabeanan. DJBC juga telah menggagas perizinan *online* terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* (OSS). Upaya yang dilakukan oleh DJBC tersebut diharapkan makin mendorong peningkatan ekspor nasional.

#### Mengendalikan impor

Untuk membangun struktur ekonomi yang kuat di masa mendatang, diperlukan perbaikan sektor industri hulu. Hal ini menjadi penting karena hasil dari industri hulu tersebutlah yang akan menjadi modal untuk digunakan pada industri selanjutnya. Harapannya, dengan semakin banyak industri hulu yang dibangun di Indonesia akan mengurangi impor barang-barang modal yang komposisinya masih terhitung besar.

Merespons hal tersebut, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan strategi pengurangan defisit dengan optimalisasi tingkat kandungan dalam negeri, pengurangan impor BBM solar melalui substitusi *mandatory* penggunaan Biodiesel 20 (B20), pengendalian impor barang konsumsi yang berfokus pada rencana kenaikan PPh Pasal 22, serta

pengembangan dan penyebaran industri di luar Jawa.

Berbagai macam usaha pemerintah telah dilakukan untuk menstabilkan CAD dan menjaga Rupiah. Neraca perdagangan bulan Oktober 2018 mencatatkan defisit sebesar USD1,82 miliar, dimana pada bulan sebelumnya (September) mencatat surplus sebesar USD314 juta. Sehingga, secara kumulatif, defisit Januari–Oktober 2018 tercatat sebesar USD5,51 miliar.

Perkembangan harga di tingkat konsumen hingga November 2018 menggambarkan stabilitas ekonomi domestik yang tetap terjaga. Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah mulai mengalami penurunan pada November 2018 dan akan sedikit mengalami tekanan pada Desember 2018. Per Akhir November 2018 nilai tukar rupiah tercatat pada level Rp14.577,0 per dolar Amerika Serikat, atau terdepresiasi sebesar 7,64 persen *year-to-date* (ytd). Perkembangan penguatan nilai tukar Rupiah sangat dipengaruhi oleh *risk appetite* dan kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam meningkatkan kinerja ekonomi nasional. Namun demikian, *outlook* pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun masih optimis berada pada kisaran target yang telah ditetapkan sebesar 5,1 hingga 5,2 persen.

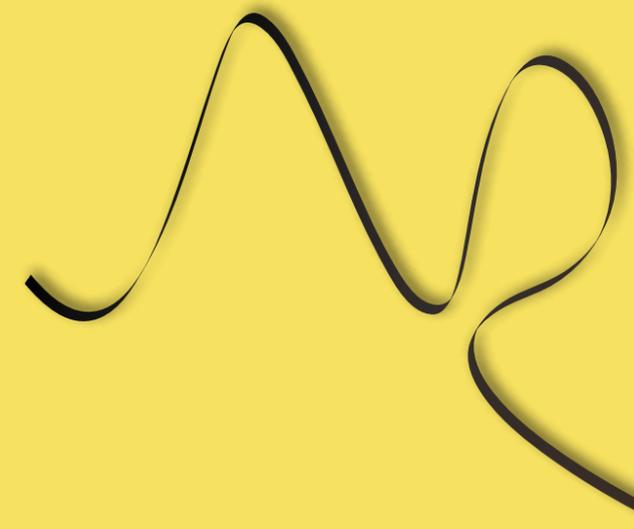


# Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas

---

Akhir Desember merupakan titik berakhirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018. Menelusuri kilas kinerja awal tahun ini, APBN 2018 menjadi salah satu sarana pemerintah untuk mewujudkan visi Presiden Joko Widodo, yakni mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Tahun ini, Presiden sendiri memiliki terobosan baru dengan mendorong penggunaan Dana Desa agar mampu menciptakan lapangan kerja melalui program padat karya tunai.

Foto Rezky Ramadhan    Teks Abdul Aziz



Terkait program tersebut, mantan Kepala Staf Presiden, Teten Masduki menjelaskan bahwa masyarakat bisa bekerja dalam program pembangunan infrastruktur yang dilakukan melalui skema Dana Desa yang telah ada ataupun melalui program kementerian teknis lainnya yang memiliki program di desa. Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, memaparkan lebih lanjut terkait skema program padat karya yang akan diterapkan dalam APBN 2018. Menurutnya, Dana Desa akan ditetapkan sekitar 30 persen alokasinya untuk gaji masyarakat desa yang bekerja pada proyek swakelola Dana Desa.

Sebagai wujud pengawasan, awal tahun 2018 Presiden pun menyempatkan diri meninjau salah satu pembangunan irigasi di daerah persawahan Kabupaten Tegal pasca kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kali ini, Presiden ingin melihat secara langsung dimulainya pelaksanaan program padat karya tunai. Program ini tidak hanya akan meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatnya daya beli, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas.

#### Postur realisasi APBN 2018

Selain program padat karya tunai, berbagai capaian program prioritas pemerintah juga diwujudkan dalam realisasi postur APBN. Tercatat per akhir November 2018, angka realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.662,94 triliun atau mencapai 87,77 persen dari target penerimaan pendapatan negara dan hibah pada APBN 2018. Menilik jenis penerimaannya, pendapatan negara yang berasal dari penerimaan Perpajakan, PNBPN, dan Hibah berturut-turut sebesar Rp1.301,48 triliun, Rp350,86 triliun, dan Rp10,60 triliun atau masing-masing telah mencapai 80,43 persen, 127,39 persen, dan 885,75 persen terhadap postur target penerimaan yang ditetapkan.

#### Realisasi APBN 2018 s.d 30 November 2018

	APBN 2018	Realisasi s.d. 30 Nov	% thd APBNP
 Pendapatan Negara	1,894,720.4	1,662,937.8	87.8%
 Belanja Negara	2,220,657.0	1.942.926,4	87.5%
 Keseimbangan Primer	(87,329.5)	(28.876,1)	33.1%
 Surplus/ (Defisit) Anggaran	(325,936.6)	(279.988,6)	
 Pembiayaan Anggaran	325,936.6	346.157,6	106.2%

\*dalam miliar Rupiah

Dari sisi pertumbuhannya terhadap penerimaan pada periode yang sama tahun lalu, realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBPN tetap tumbuh berturut-turut sebesar 15,27 persen *year-on-year* (yoy) dan 31,54 persen (yoy). Komponen penerimaan Perpajakan sampai dengan November 2018 tercatat sebesar Rp1.136,66 triliun merupakan realisasi penerimaan Pajak, sedangkan realisasi dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai tercatat sebesar Rp164,82 triliun, atau masing-masing telah mencapai 79,82 persen dan 84,91 persen dari target penerimaan Pajak dan target penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada APBN 2018.

Per akhir November 2018, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp350,86 triliun atau 127,39 persen dari target APBN tahun

2018. Realisasi PNBPN bulan ini tumbuh sebesar 31,54 persen jika dibandingkan dengan realisasi PNBPN pada November 2017. Kenaikan rata-rata harga komoditas minyak bumi dan batu bara sepanjang periode Januari-November 2018 yang terus berlanjut menjadi faktor utama yang menyebabkan peningkatan realisasi PNBPN.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir November 2018 sebesar Rp1.942,93 triliun (87,49 persen dari pagu APBN tahun 2018), tumbuh 11,06 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.225,86 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp717,07 triliun. Membaiknya kinerja penyerapan tersebut seiring dengan komitmen Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran. Capaian realisasi TKDD tersebut secara lebih rinci terbagi menjadi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp662,64 triliun (93,84 persen) dan Dana Desa Rp54,43 triliun (90,71 persen).

Keberlanjutan fiskal sampai akhir November 2018 masih tetap terjaga. Realisasi defisit APBN hingga November 2018 mencapai Rp279,99 triliun atau 1,89 persen terhadap

PDB, merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir pada periode yang sama. Realisasi defisit tersebut lebih rendah dari realisasi defisit di periode yang sama tahun sebelumnya, baik secara nominal sebesar Rp349,64 triliun maupun persentase terhadap PDB 2,59 persen pada tahun lalu. Selain itu, posisi keseimbangan primer hingga November 2018 berada pada posisi negatif Rp28,88 triliun, merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir pada periode yang sama. Keseimbangan primer yang menuju kearah positif tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah yang tetap menjaga pengelolaan APBN yang sehat dan berkelanjutan.

#### Berinvestasi Untuk Generasi Nanti

Di sisi lain, untuk menjamin keberlanjutan kebijakan fiskal, DPR dan pemerintah telah mengesahkan UU APBN 2019 pada 31 Oktober 2018 yang lalu. Dalam APBN 2019, pemerintah memberikan perhatian khusus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai fokus utamanya. Tercatat APBN 2019 akan mengelola belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun dengan pendapatan negara sebesar Rp2.165,1 triliun dan pembiayaan sebesar Rp296 triliun.

Rencana Kerja Pemerintah 2019 sendiri mengambil tema "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas". Tema tersebut diarahkan pada upaya pembangunan SDM dan upaya pemerataan pembangunan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Oleh karena itu, belanja APBN 2019 akan lebih difokuskan pada investasi di bidang pendidikan dan kesehatan guna menghasilkan SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di kancah internasional.

Sebagai bukti, tren anggaran pendidikan pun mengalami kenaikan untuk APBN 2019 dari Rp444,1 triliun pada 2018 menjadi Rp492,5 triliun

**"Itu yang kemudian menjadi tulang punggung daripada alokasi belanja kita. Satu Belanja Pendidikan, kedua Infrastruktur, kemudian Belanja Kesehatan, yang satu lagi yang juga dominan itu Perlindungan Sosial, yang jumlahnya juga signifikan baik melalui PKH (Program Keluarga Harapan) maupun subsidi,"**

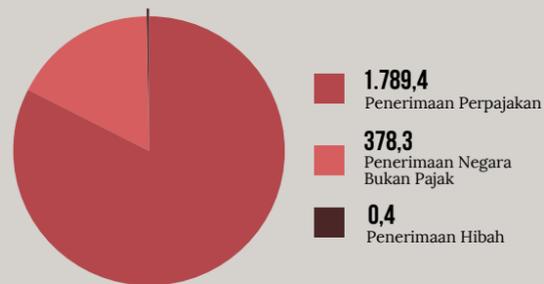
#### Askolani

Direktur Jenderal Anggaran

## Postur APBN 2019

Pendapatan  
Negara

# 2.165,1



Belanja  
Negara

# 2.461,1



pada APBN 2019. Atau dengan kata lain, total anggaran pendidikan naik sebesar Rp48,4 triliun pada 2019. Begitu pun untuk sektor kesehatan. Alokasi anggaran untuk tahun 2019 naik sebesar Rp12,1 triliun menjadi Rp123,1 triliun. Sementara itu, belanja infrastruktur nilainya pun tetap meningkat dari Rp410 triliun pada 2018 menjadi Rp415 triliun dalam APBN 2019.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Anggaran, Askolani, mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka menengah dan jangka panjang. Alokasi anggaran pun tidak hanya di Kementerian/Lembaga pusat, namun juga dialokasikan ke Pemerintah Daerah melalui dana transfer ke daerah.

“Itu yang kemudian menjadi tulang punggung daripada alokasi belanja kita. Satu Belanja Pendidikan, kedua Infrastruktur, kemudian Belanja Kesehatan, yang satu lagi yang juga dominan itu Perlindungan Sosial, yang jumlahnya juga signifikan baik melalui PKH (Program Keluarga Harapan) maupun subsidi,” jelasnya kepada Media Keuangan dalam wawancara beberapa waktu lalu.

### Seperlima APBN untuk pendidikan

Lebih jauh, Askolani juga menjelaskan pada tahun ini alokasi yang diberikan untuk pendidikan sebesar Rp492,5 triliun dari total APBN yang sebesar Rp2.461,1 triliun, sehingga total alokasi Belanja Pendidikan terhitung sebesar 20 persen dari APBN. Senada dengan hal tersebut, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Purwanto, mengungkapkan anggaran pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Sejak tahun 2009, besaran anggaran pendidikan telah dialokasikan sebesar seperlima dari APBN. Alokasi kesehatan sendiri sudah mencapai 5 persen dari APBN sejak tahun 2016. “Jumlah tersebut terus meningkat secara signifikan seiring dengan meningkatnya volume APBN kita,” jelas Purwanto.

Lebih detail, Purwanto pun menjelaskan melalui Program Indonesia Pintar yang menasar anak didik dari kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu untuk membantu anak-anak usia sekolah agar tetap

mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah sampai tamat, baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan nonformal. Selain itu, juga ada Bidikmisi yang diperuntukkan bagi mereka yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditujukan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Terkait infrastruktur pendidikan, Pemerintah Pusat dan Daerah terus berusaha menyediakan tempat belajar yang layak bagi siswa melalui pembangunan Unit Sekolah Baru, Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi Ruang Kelas, Sarana Pendidikan Lain, Revitalisasi/Renovasi Sekolah Berasrama, Ruang Penunjang, dan Sekolah Satu Atap, serta penyediaan peralatan pendidikan yang memadai.

### Manusia sehat berkualitas

Pada hakikatnya, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan sudah sedemikian besarnya, sehingga yang harus menjadi perhatian adalah kualitas penggunaan anggarannya sendiri. Menurut Purwanto, masih banyak hal yang perlu diperbaiki seperti masih banyaknya sekolah yang rusak dan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terbatas. Namun demikian, hal yang perlu ditekankan adalah anggaran pemerintah hingga saat ini masih terbatas dan perlu pengalokasian yang sesuai dengan kebutuhan program-program pemerintah.

Tak hanya itu, selain ingin meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pemerintah juga fokus untuk meningkatkan kesehatan dari manusianya. Purwanto menuturkan pentingnya aspek kesehatan dalam program pembangunan SDM. Untuk itu, anggaran kesehatan diarahkan untuk percepatan peningkatan kepesertaan JKN; peningkatan akses dan kualitas layanan program JKN; mendorong *supply side* melalui sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah; mendorong pola hidup sehat melalui Germas (Gerakan Masyarakat Sehat); peningkatan nutrisi ibu hamil, menyusui dan balita, serta imunisasi; percepatan penurunan *stunting* melalui skema Program for Result (PforR); serta pemerataan akses layanan kesehatan melalui DAK Fisik dan pembangunan rumah sakit di daerah menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Senada dengan Purwanto, Kepala Pusat Kebijakan APBN, Hidayat Amir, mengungkapkan kondisi masyarakat Indonesia yang menuju bonus demografi angkatan usia produktif. Untuk itu, permasalahan kesehatan SDM seperti *stunting* menjadi masalah serius karena dapat berdampak pada tingkat kecerdasan dan pertumbuhan fisik yang rentan terhadap rendahnya daya tahan tubuh. Ujungnya, tingkat produktivitas yang seharusnya bisa dicapai pun menurun.

### Menyongsong 2019

Amir menjelaskan lebih jauh terkait tantangan APBN yang perlu diantisipasi oleh pemerintah dalam menghadapi tahun 2019. Menurutnya, tantangan terbesar masih berasal dari ketidakpastian yang masih tinggi dari situasi global. “Kemarin misalnya dalam World Bank-IMF *Annual Meeting* ada *release world economic outlook*. Itu hampir semua negara pertumbuhannya terkoreksi di tahun depan,” terangnya.

Dari sisi domestik, meski memasuki tahun politik, namun hemat Amir berdasarkan pengalaman tahun politik sebelum-sebelumnya relatif masih aman. Untuk itu, ia berharap kondisi yang stabil dan aman di dalam negeri dapat mendorong sektor perdagangan melalui sisi ekspornya. Harapannya, ekspor akan bisa menjadi mesin pendorong untuk pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, dari sisi konsumsi rumah tangga masih memberikan kontribusi yang besar sekitar 56 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga daya beli atau dengan kata lain menjaga inflasi. Amir mengungkapkan dengan berhasilnya proyek infrastruktur, inflasi yang berasal dari *volatile food* sudah mulai terkendali dan stabil. Hal itu dikarenakan dengan adanya infrastruktur proses distribusi logistik saat ini menjadi lebih mudah dan baik.



# Tumbuh Bersama Infrastruktur Berkeadilan

---

Sejak 2015 hingga saat ini, Indonesia giat melakukan pembangunan infrastruktur. Misalnya pembangunan sejumlah ruas jalan, bandar udara, dan kereta api ringan. Pembangunan ini mendesak dilakukan, mengingat ketersediaan dan kualitas infrastruktur Indonesia sudah jauh tertinggal dengan negara lain.

Foto Tino Adi P.

Teks Irma Kesuma D.

## "Membangun infrastruktur bukan kemewahan atau hobi tapi kebutuhan. Ini bukan *fancy idea*. Ini yang dibutuhkan negara dengan 250 juta penduduk dan belasan ribu pulau,"

**Sri Mulyani I.**  
Menteri  
Keuangan

Pada dasarnya, infrastruktur dimaksudkan untuk mendorong produktivitas dan daya saing. Dengan konektivitas antarwilayah yang semakin cepat dan mudah, kita semua berharap akan tumbuh pusat-pusat ekonomi baru yang merata di seluruh tanah air. Sebab itu, pembangunannya tidak hanya dilakukan di Jawa, namun juga di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Nusa Tenggara, hingga tanah Papua.

Dalam sidang tahunan MPR di Jakarta Agustus lalu, Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan infrastruktur fisik tidak semata dilakukan untuk mendorong ekonomi. Sesungguhnya, Indonesia juga tengah membangun peradaban serta mempertemukan berbagai budaya yang berbeda dari seluruh tanah air.

“Orang Aceh bisa mudah terhubung dengan orang Papua, orang Rote bisa terhubung dengan saudara-saudara kita di Miangas, sehingga bisa semakin merasakan bahwa kita satu bangsa, satu tanah air,” ujar Presiden.

### Alokasi Anggaran dan Daya Saing

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menuturkan, proyek infrastruktur merupakan komitmen jangka panjang. Menurutnya, jika pertumbuhan ekonomi terus didorong tanpa disertai ketersediaan infrastruktur yang memadai, maka biaya-biaya logistik akan semakin mahal. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi akan melambat.

“Membangun infrastruktur bukan kemewahan atau hobi, tapi kebutuhan. Ini bukan *fancy idea*. Ini yang dibutuhkan negara dengan 250 juta penduduk dan belasan ribu pulau,” katanya. Meski belum rampung dan masih jauh dari cukup, efek positif pengembangan infrastruktur saat ini dinilai akan bisa dirasakan hingga 40 tahun ke depan.

Besaran anggaran infrastruktur

terus meningkat setiap tahun. Tahun 2015 pemerintah mengalokasikan Rp281,7 triliun, naik menjadi Rp316,6 triliun pada 2016. Tahun 2017 meningkat lagi menjadi Rp386,9 triliun pada tahun lalu, dan tahun ini naik kembali menjadi Rp410,7 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan alokasi anggaran tertinggi sebesar Rp104,7 triliun. Sisanya dialokasikan melalui Kementerian Perhubungan sebesar Rp44,2 triliun, DAK sebesar Rp33,9 triliun, serta investasi pemerintah lewat PMN dan LMAN sebesar Rp41,5 triliun.

Sasaran penggunaan anggaran tersebut adalah untuk pembangunan dan preservasi jalan baru (832 km), pembangunan jalan tol (33 km), pembangunan jembatan (15.373 m). Selain itu anggaran infrastruktur juga digunakan untuk memperbaiki prasarana perkeretapiannya (639 km) serta pembangunan bandara udara baru di delapan lokasi, baik penyelesaian maupun lanjutan.

Untuk bidang informasi dan telekomunikasi, sasarannya adalah pembangunan jaringan pita lebar terpadu di 100 lokasi dan pembangunan BTS di daerah blankspot, terutama di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar di 380 lokasi.

Terakhir, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Diantaranya, untuk pembangunan 13.405 rumah susun dan bantuan stimulan, baik untuk peningkatan maupun pembangunan 174.300 unit baru.

Data Global Competitiveness Index 2017 menunjukkan indeks daya saing infrastruktur Indonesia tahun 2017-2018 berada di urutan ke-52. Posisi ini naik delapan peringkat dibanding periode 2016-2017 di urutan ke-60, dan naik 10 peringkat dibanding periode 2015-2016 di urutan 62

dari 137 negara. Capaian tersebut masih tertinggal dari beberapa negara tetangga seperti Malaysia di urutan 22, Singapura 26, dan Thailand 43.

Meski begitu, indeks daya saing Indonesia di dunia internasional tetap semakin membaik. Periode 2017-2018, indeks daya saing global Indonesia naik lima peringkat ke posisi 36. Sebelumnya Indonesia mendapat ranking 41 di periode 2016-2017 dan ranking 37 di pada periode 2015-2016.

### Asian Games Titik Balik Infrastruktur

Di tahun 2018 Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games ke-18. Pesta olahraga terbesar se-Asia ini menjadi satu momen bersejarah untuk mempopulerkan Indonesia di mata dunia. Ajang ini sekaligus menjadi titik balik bagi Indonesia untuk memperbaiki serta membangun sejumlah infrastruktur utama dan penunjang.

Anggaran penyelenggaraan Asian Games mencapai Rp30 trilun. Selain untuk penyelenggaraan, anggaran ini juga digunakan untuk membangun infrastruktur yang bisa digunakan dalam jangka panjang.

Beberapa contoh diantaranya adalah pembangunan LRT rute Kelapa Gading-Velodrome (Jakarta), LRT Palembang, renovasi Jakabaring Sport City, jalan tol Kayu Agung-Palembang-Betung, *flyover* dan jembatan Musi IV serta VI.

Pemerintah juga memperbaiki sejumlah sarana prasana pendukung, serta membangun sejumlah *venue* baru. Misalnya, pembangunan stadion utama Gelora Bung Karno, wisma atlet, *velodrome* balap sepeda, *equestrian* pacuan kuda, dan *venue* pertandingan sepeda BMX.

Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Bapenas mengatakan, pilihan transportasi baru yang manusiawi akan mendorong warga kota untuk menggunakan kendaraan umum. “Kalau

dulu mau kemana-mana kita langsung berpikir mau naik bus kota. Nah, ke depan, kalau bicara angkutan umum, yang muncul di benak publik langsung Trans Jakarta, LRT, atau MRT,” kata Bambang.

Masyarakat umum bisa memanfaatkan lokasi perlombaan dalam jangka panjang. Sebab, cabang olahraga yang kurang populer sekalipun tetap ada induknya di Indonesia. Setelah Asian Games selesai, para atlet nantinya jadi punya tempat berlatih yang lebih banyak dan lebih berkualitas.

Asian Games 2018 juga menjadi momen untuk memperbaiki prestasi olahraga dari hal yang paling mendasar, yakni sarana yang layak. “Kalau tidak ada Asian Games, saya tidak yakin akan ada perbaikan serius. “Saya ingat, *hall* serbaguna di Senayan sudah tidak layak pakai. Tetapi sekarang sudah baru sama sekali,” kata Bambang.

Sesudah Asian Games 2018 rampung, wisma atlet di kawasan Kemayoran akan disulap menjadi apartemen kelas menengah. Ini juga untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk beralih dari rumah tapak. “Tanah di Jakarta sudah terbatas. Untuk kota seperti Jakarta hunian vertikal lebih masuk akal,” ucap Bambang.

Sementara, untuk *venue* olahraga yang sifatnya di dalam ruangan seperti seni bela, wushu, angkat besi bulu tangkis, ruangan rencananya akan dimanfaatkan untuk beragam kegiatan. Misalnya acara musik, pendidikan, festival, pameran, atau bahkan atraksi wisata.

### Capaian Pembangunan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kebutuhan masyarakat akan ketersediaan infrastruktur masih sangat besar. Pemerintah menargetkan daya saing Indonesia bisa berada pada peringkat ke-40. Meski pada tahun 2019 pemerintah berencana untuk fokus pada pembangunan manusia, tetapi pembangunan

infrastruktur akan tetap dilanjutkan.

Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga menyelesaikan pembangunan jalan nasional sepanjang 3.432 km, termasuk jalan di perbatasan Papua, Kalimantan, dan NTT. Kemudian telah dibangun jalan tol baru sepanjang 941 km dengan target akhir 2019 mencapai 1.852 km. Selain itu, pembangunan jembatan bentang panjang dan jembatan gantung yang menghubungkan antardesa juga menjadi prioritas.

Untuk mendukung ketahanan air dan pangan, pemerintah menargetkan pembangun 65 bendungan. Pada tahun 2018 sebanyak 8 bendungan telah rampung yakni Bendungan Paya Seunara dan Rajui di Aceh, Jatigede di Jabar, Bajulmati dan Nipah Jatim, Titab di Bali, Teritip di Balikpapan, Raknamo dan Tanju di NTB. Bendungan lainnya akan selesai bertahap hingga tahun 2023.

Pembangunan 65 bendungan akan menambah layanan irigasi waduk sebanyak 160 ribu hektar. Diharapkan, keseluruhan waduk akan menambah kapasitas tamping menjadi 2,11 miliar m<sup>3</sup>, menyediakan air baku sebanyak 3,02 m<sup>3</sup>/detik, serta menghasilkan potensi energi sebesar 145MW.

“Terdapat lima aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yakni benih, pupuk, tanah, penyuluhan, dan air. Apapun yang dilakukan dalam pertanian tanpa air tidak akan terwujud. Karena itu, kita bangun bendungan, embung, dan jaringan irigasi,” kata Menteri PUPR.

Sejak 2015 hingga 2018, Kementerian PUPR telah membangun jaringan irigasi baru seluas 860.015 hektar dan merehabilitasi 2.319.693 hektar. Sementara embung yang selesai dibangun sebanyak 949 embung dari target 1.088 embung hingga tahun 2019 yang tersebar di seluruh Indonesia.



# Perlu Modal Membangun Negara

---

Kemudahan dalam mengakses layanan dasar adalah hak setiap warga negara. Begitupun geliat pembangunan, harus bisa dirasakan manfaatnya oleh setiap masyarakat Indonesia di manapun berada. Negara hadir untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, guna membiayai kebutuhan dimaksud, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Di sinilah peran masyarakat dalam menyokong pembangunan negara, yaitu dengan membayar pajak. Saat ini, pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara. Kontribusinya mencapai sekitar 80 persen penerimaan negara. Agar tergali dan bermanfaat optimal, pemerintah menjalankan sejumlah kebijakan secara andal dan bertanggung jawab.

Foto Abdul Aziz

Teks Farida Rosadi



“Hanya dalam waktu enam bulan telah ada delapan wajib pajak yang mendapatkan (*tax holiday*). Total investasi dalam waktu enam bulan dari delapan wajib pajak ini adalah Rp161,3 triliun, sangat signifikan meningkat”

Sri Mulyani  
Indrawati  
Menteri  
Keuangan

Jelang berakhirnya tahun 2018, penerimaan pendapatan negara dan hibah mencatatkan angka realisasi yang cukup menggembirakan. Hingga akhir November 2018, realisasi pendapatan negara dan hibah diketahui mencapai Rp1.662,94 triliun atau 87,8 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp1.894,7 triliun. Secara umum, komponen penerimaan pendapatan negara disokong oleh penerimaan perpajakan (yang meliputi penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanan dan cukai), penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah.

Berdasarkan capaian tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.301,48 triliun atau 80,43 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp1.618,1 triliun. Dari jumlah ini, penerimaan pada sektor pajak mencapai Rp1.136,66 triliun atau 79,82 persen dari target, sedangkan penerimaan sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp164,82 triliun atau 84,91 persen dari target.

Meski belum mencapai target, realisasi penerimaan pajak hingga akhir November tumbuh 15,35 persen. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain kontribusi PPh 22 Impor, PPh 25/29 Badan dan Orang Pribadi, serta pertumbuhan PPN Impor yang cukup tinggi. Sementara untuk penerimaan kepabeanan dan cukai secara keseluruhan tumbuh sebesar 14,7 persen. Hal ini didukung oleh komponen penerimaan pada cukai dan bea masuk.

#### Jurus capaian

Tidak bisa dipungkiri, penerimaan pajak adalah komponen terbesar dalam pendapatan negara. Meski demikian, hingga saat ini, sejumlah kendala baik dari internal maupun eksternal, masih menjadi ganjalan dalam mencapai target penerimaan pajak. Guna mengatasi masalah internal, pemerintah telah dan terus melakukan perbaikan melalui reformasi birokrasi di tubuh organisasi.

Efektivitas organisasi terus ditingkatkan, termasuk pada kualitas layanan. Selanjutnya, data dan sistem informasi perpajakan terus dimutakhirkan dan terintegrasi dengan sejumlah aplikasi perpajakan yang meliputi *e-filling*, *e-form*, dan *e-faktur*. Kepatuhan wajib pajak terus digenjot dengan membangun kesadaran pajak lewat sejumlah layanan, seperti *e-service*, *mobile tax unit*, KPP Mikro, hingga *outbond call*. Meski demikian, pemerintah tetap memberikan sejumlah insentif perpajakan melalui *tax holiday* dan *tax allowance*, serta melakukan reviu pada kebijakan *exemption tax* pada beberapa barang kena PPN.

Untuk meningkatkan basis pajak, serta mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan, kebijakan pertukaran data secara otomatis atau *Automatic Exchange of Information* (AEOI) juga mulai diberlakukan September 2018

ini. Hal ini merupakan tindak lanjut atas diterbitkannya UU Nomor 9 Tahun 2017 pada 8 Mei 2017 lalu. Sebagaimana diketahui, terdapat sedikitnya lima informasi keuangan yang bisa diakses Ditjen Pajak, yaitu identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, serta penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

#### Tax holiday semakin mudah

Salah satu kebijakan insentif pajak uang diberikan pemerintah adalah *tax holiday*. Kebijakan *tax holiday* merupakan fasilitas pengurangan pajak penghasilan yang diperuntukkan bagi badan usaha. Hal ini dilakukan guna mendorong kegiatan industri, investasi, serta ekspor. Kebijakan *tax holiday* telah berjalan selama tiga periode dengan diterbitkannya tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yaitu PMK 130 Tahun 2011, PMK 159 Tahun 2015, serta PMK 35 Tahun 2018.

Perubahan paling signifikan atas kebijakan *tax holiday* adalah pada PMK 35 Tahun 2018. Sejumlah kemudahan yang diatur pada PMK ini diantaranya persentase pengurangan pajak melalui *tax holiday* adalah *single rate*, yaitu sebesar 100 persen. Selain itu, jangka waktu pemberian *tax holiday* didasarkan pada besaran investasi. Artinya semakin tinggi nilai investasi, maka semakin lama jangka waktu *tax holiday* yang bisa dinikmati. Selanjutnya, perusahaan juga diberikan masa transisi melalui potongan 50 persen PPh selama dua tahun sejak *tax holiday* selesai. Kebijakan ini juga memberikan perluasan kriteria industri *pioneer* menjadi 17 cakupan industri dengan 153 jenis bidang usaha.

Kebijakan dari PMK 35 Tahun 2018 mulai menampakkan hasil sejak diterbitkan pada April 2018. Hal ini diungkapkan

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 18 Oktober lalu. “Hanya dalam waktu enam bulan telah ada delapan wajib pajak yang mendapatkan (*tax holiday*). Total investasi dalam waktu enam bulan dari delapan wajib pajak ini adalah Rp161,3 triliun, sangat signifikan meningkat,” ungkap Menkeu. Sebelumnya, diakui Menkeu, dari kebijakan *tax holiday* yang diluncurkan pada 2015, belum ada satupun wajib pajak yang bisa memanfaatkannya. “Maka, kami melakukan perubahan terakhir yang cukup radikal (melalui PMK 35/2018). Melakukan simplifikasi total,” jelas Menkeu.

#### Pajak UMKM

Sementara itu, guna mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, pada 2018 pemerintah juga menetapkan kebijakan penurunan PPh Final menjadi 0,5 persen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Presiden Joko Widodo saat mensosialisasikan tarif baru ini pada Sabtu (23/06) di Bali menyampaikan harapannya, “Dengan PPh final 0,5 persen, (diharapkan) ada peluang dari keuntungan yang dapat digunakan untuk ekspansi usaha.”

Keringanan tarif pajak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 menggantikan PP 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tarif 0,5 persen tersebut dikenakan bagi Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto (omzet) hingga Rp4,8 miliar dalam satu tahun.

Adapun jangka waktu pengenaan tarif ini bagi WP Orang Pribadi adalah selama 7 tahun. Sementara bagi WP Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma adalah 4 tahun,

sedangkan untuk WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun. PP 23 Tahun 2018 ini sudah mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2018.

#### Pajak e-commerce

Salah satu yang juga menjadi perhatian pemerintah adalah terkait dengan kegiatan transaksi jual beli komersial melalui elektronik atau dikenal dengan istilah *e-commerce*. Pesatnya pertumbuhan pengguna internet berpengaruh besar terhadap pergeseran tren perdagangan dari konvensional ke digital ini.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara mengungkapkan, “Pada dasarnya, pemerintah tidak memunculkan jenis pajak baru terhadap pelaku e-commerce. Pemerintah akan menerbitkan aturan terkait tata cara pemungutan pajak yang terutang di industri e-commerce,” jelas Suahasil. Dia melanjutkan, melalui kebijakan ini pemerintah tidak semata meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga membangun sistem untuk proses bisnis *e-commerce* sehingga menciptakan *level playing field* atau kesetaraan perlakuan kepada pelaku usaha.

Direktur Peraturan Perpajakan II (PP II), Yunirwansyah, menjelaskan penerapan pajak e-commerce hanya akan melaksanakan ketentuan dalam peraturan yang telah ada saat ini, “Ketentuan UU PPh dan UU PPN sebenarnya saat ini sudah cukup mengatur, namun karena adanya kekhususan dalam model transaksinya, maka tata cara pemungutan atau penyetoran pajaknya perlu diatur agar memberikan kemudahan dan kesederhanaan administrasinya untuk seluruh model transaksi digital ekonomi,” jelasnya.

Senada dengan hal ini Yustinus Prastowo, Direktur Center for Indonesia

Taxation Analysis (CITA), menjelaskan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri telah memetakan e-commerce di Indonesia ke dalam empat model bisnis yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013, yakni Online Marketplace (misalnya tokopedia.com), Classified Ads (misalnya tokobagus.com), Daily Deals (misalnya lakupon.com), dan Online Retail (misalnya lazada.com).

#### PNBP gemilang

Kontribusi PNBP dalam capaian realisasi penerimaan APBN 2018 mencatatkan angka gemilang. Realisasi PNBP mencapai Rp350,86 triliun atau melampaui target APBN hingga 127,39 persen. Meski kenaikan rata-rata harga komoditas minyak bumi dan batu bara menjadi faktor utama peningkatan realisasi PNBP, namun pemerintah terus mengupayakan agar ke depan kenaikan PNBP tidak bergantung dari faktor eksternal.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola dan mengoptimalkan PNBP adalah dengan menerbitkan UU PNBP Tahun 2018 menggantikan UU PNBP Tahun 1997. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan maksud diterbitkannya UU PNBP 2018 ini.

“Revisi UU PNBP adalah untuk memperbaiki tata kelola PNBP, diharapkan untuk PNBP yang berhubungan dengan pelayanan publik tidak sekedar memungut masyarakat, tapi harus ada *earn return* sebagai balasannya, pelayanan yang makin baik kepada masyarakat, tata kelola yang bersih, dan akuntabel,” ujarnya. Beberapa penyempurnaan pokok dalam RUU PNBP ini meliputi pengelompokkan objek, pengaturan tarif, tata kelola, pengawasan, dan hak Wajib Bayar.



# Kelola Pembiayaan Untuk Kesejahteraan

Utang, merupakan konsekuensi dari belanja negara yang ekspansif. Kebutuhan belanja ini seringkali tidak bisa ditunda, misalnya untuk penyediaan fasilitas kesehatan dan ketahanan pangan. Penundaan pembiayaan justru akan mengakibatkan tambahan biaya atau kerugian yang lebih besar di masa mendatang.

Foto Elsan Anugrah P. Teks Irma Kesuma D.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, utang atau pembiayaan bukanlah tujuan, melainkan sebuah alat mencapai kesejahteraan. Menkeu mencontohkan, di dunia usaha, tujuan utang adalah untuk memajukan usaha, memperluas pasar, serta meningkatkan profit.

Sedangkan pada tingkat negara, masih banyak masyarakat yang membutuhkan pendidikan, akses kesehatan, atau konektivitas antardaerah. Tingkat kemiskinan juga masih harus ditekan agar negara mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan adil. Sebab itu, selain penerimaan pajak, negara juga membutuhkan pembiayaan sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan tersebut.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan (Dirjen PPR) Luky Alfirman menyampaikan, Pemerintah selalu mengelola utang dengan hati-hati, tepat sasaran, dan terencana dengan matang.

“Utang adalah salah satu instrumen yang ada di APBN. Kalau belanjanya lebih besar dari penerimaan, kita akan mengalami defisit. Cara menutupi defisit tersebut adalah dengan utang. Jadi, yang perlu dipahami ketika kita melakukan utang, semua sudah terencana,” ujar Luky.

Luky menegaskan, hal yang paling penting adalah keseluruhan utang tersebut dikelola secara hati-hati dan dialokasikan di tempat yang tepat sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Jadi, buat apa sih utang? Lihat efektivitas dan optimalitas struktur belanja kita yang sifatnya investasi. Ada dua penggunaan utama yakni untuk

infrastruktur dan investasi pada sumber daya manusia. Keuntungannya baru dirasakan di masa yang akan datang,” jelasnya.

#### Posisi Pembiayaan 2018

Dipaparkan Luky lebih lanjut, posisi utang Pemerintah saat ini masih relatif aman. Jumlah akumulasi utang saat ini masih di bawah 30 persen, jauh dari batas maksimal sebesar 60 persen dari PDB. “Kita akan tetap menjaganya agar tetap di bawah 30 persen. Jadi, dari sisi kemampuan membayar, kita masih sangat sangat aman,” tegasnya.

Namun demikian, Dirjen DJPPR mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh terlena dengan level aman tersebut. Oleh karena itu, DJPPR menyiapkan beberapa tindakan antisipatif seperti protokol pengelolaan krisis, berupa pengklasifikasian tingkat krisis kondisi Pasar Surat Berharga Pemerintah dan Bond *Stabilization Framework* dalam bentuk pembelian kembali Surat Berharga Negara (SBN).

Hingga akhir November 2018, rasio utang terhadap PDB masih dalam level aman dan terkendali sebesar 29,91 persen. Unsur pembiayaan utang terdiri atas Surat SBN serta pinjaman.

SBN dibagi atas 2 format yaitu konvensional (Surat Utang Negara) dan format syariah (Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk), sementara pinjaman terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Pembiayaan utang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi karena pendapatan negara belum mencukupi untuk mencapai target-target Pemerintah, termasuk

target pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia.

Pengelolaannya dilakukan secara hati-hati. Selain memperhitungkan kemampuan membayar, pemerintah juga merencanakan peruntukannya agar produktif. Artinya, pembiayaan tersebut digunakan untuk pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat, serta menggerakkan kemajuan bangsa.

Namun, Pemerintah tidak akan selalu tergantung pada utang untuk menutup defisit APBN. Ada beberapa strategi lain yang digunakan. Misalnya, dengan mengembangkan format pembiayaan alternatif seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta *green* sukuk yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan format pembiayaan alternatif tersebut, ketergantungan pemerintah pada utang akan semakin berkurang. Pada akhirnya, APBN akan semakin mandiri.

Selain itu, untuk menghindari fluktuasi rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, Pemerintah semakin fokus mengembangkan pasar domestik. Hal tersebut tercermin dari realisasi APBN November 2018.

Realisasi pembiayaan utang hingga akhir November 2018 telah mencapai Rp361,91 triliun 90,65 persen dari target. Besaran realisasi pembiayaan utang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -18,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut terjadi baik pada realisasi SBN maupun dari penarikan pinjaman luar negeri. Dengan semakin beragamnya format pembiayaan yang ada, diharapkan ketergantungan pemerintah terhadap utang serta pinjaman luar negeri semakin kecil.

Rasio utang Pemerintah terhadap PDB per akhir November mencapai 29,91 persen. Rasio ini menurun dibanding bulan sebelumnya sebesar 30,68 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya pelunasan utang jatuh tempo dan penguatan kurs rupiah.

Untuk mengurangi beban pembiayaan akibat fluktuasi mata uang, pemerintah telah menyiapkan strategi penangkal ketidakpastian pasar keuangan. Salah satunya

adalah mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid, untuk efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang.

Pasar domestik SBN Indonesia sangat luas dan belum tergarap optimal. Dengan komposisi penduduk yang didominasi oleh kaum muda, perlu strategi khusus untuk menggarap pasar tersebut. Sebab itu, pemerintah mulai mendayagunakan jalur financial technology (fintech) seperti e-SBN.

#### Inovasi E-SBN

Surat Berharga Negara (SBN) SBR 003 resmi diterbitkan pertengahan Mei lalu. Proses pemesanannya sudah bisa dilakukan secara *online* (e-SBN). Instrumen baru ini diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat dari sekedar senang menabung menjadi sadar berinvestasi.

Loto Srinaita Ginting, Direktur Surat Utang Negara mengatakan, ada beberapa hal yang membuat pemerintah mempertimbangkan e-SBN. Pertama, Obligasi Ritel Indonesia sudah 10 tahun diluncurkan. Hasil evaluasinya menunjukkan sekitar 75 persen investor ritel saat ini berusia 40 tahun ke atas.

Profil ini bisa dimaklumi mengingat umumnya di usia 40 tahun ke atas

orang sudah relatif lebih mapan. Kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi sehingga ada dana untuk investasi. Peluncuran e-SBN adalah untuk memperluas basis investor muda yang terbiasa dengan gawai.

Selain itu, sistem penjualan yang dilakukan yang selama ini dilakukan secara *offline* menggunakan sistem kuota. Akibatnya ada kecenderungan agen penjual lebih melayani investor-investor besar. “Waktu itu, ada masukan dari investor biasa yang mengatakan dia agak kecewa karena kuotanya kerap habis,” kata Loto.

Alasan lainnya, pemasaran ke pelosok Indonesia selama ini masih terbatas, baik dari sisi dana maupun infrastruktur. e-SBN bisa mengurangi hambatan-hambatan tersebut. Biaya promosi dengan mengunjungi secara langsung bisa ditekan. “Meski tidak ada edukasi tatap muka, tetapi semua daerah dengan akses internet bisa menjangkau informasinya,” jelas Loto.

*Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech* OJK, Hendrikus Passagi mengatakan, penyaluran SBN melalui *fintech* sudah tepat. Instrumen yang mudah diakses bisa menarik generasi milenial yang tidak suka proses panjang dan sangat tergantung internet.

Hendrikus memaparkan, layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi menyimpan potensi sangat besar. Hal ini dapat ditandai jumlah pengguna *mobile* internet aktif di Indonesia yang mencapai 124,8 juta pengguna, sedangkan pengguna internet aktif sebesar 132,7 pengguna menurut data *We are Social* (2018) dalam Global Web Index. “Dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar ini, e-SBN bisa menambah investor domestik dalam kepemilikan surat utang Indonesia,” kata Hendrikus.

Produk e-SBN yang paling mutakhir adalah ST-002 yang ditawarkan ke publik pada 2 hingga 22 November 2018. Hasil pemesanan dan pembeliannya mengalami *oversubscribe* 2,9 kali. Sementara, investornya didominasi oleh milenial yang mencapai 44,61 persen dari total pembeli.

Pemerintah berharap dengan memanfaatkan *fintech* untuk menyasar pasar milenial serta pasar dalam negeri, akan terbangun “militansi” penduduk Indonesia untuk mendukung pembangunan dan kemajuan negara. Dengan begitu, pasar Surat Utang akan lebih kondusif, tanpa terpengaruh fluktuasi harga valuta. Pada akhirnya, sila ke-5 dari Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dapat terwujud.

**"Utang atau pembiayaan bukanlah tujuan, melainkan sebuah alat mencapai kesejahteraan."**

**Sri Mulyani  
Indrawati  
Menteri  
Keuangan**



## Putus Rantai Perusak Generasi

---

Indonesia masih menjadi surga bagi para sindikat narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba). Perkembangan penyalahgunaan narkoba yang semakin mengkhawatirkan membawa Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Hal ini ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada 2015 lalu, pasca diterimanya Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2014. Dalam laporan dimaksud, diketahui prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 4 juta lebih, merugikan negara hingga Rp63 triliun per tahun dan menyebabkan kematian hingga 30-40 orang per hari.

Foto Dok. DJBC

Teks Farida Rosadi

Status Indonesia darurat narkoba sesungguhnya telah mulai ditetapkan sejak kepemimpinan Presiden Republik Indonesia ke-2, Soeharto, pada 1971 silam. Sayangnya, hingga saat ini, pemberantasan narkoba masih menjadi pekerjaan besar yang belum kunjung usai. Tingginya permintaan akan suplai narkoba di dalam negeri, hingga luasnya wilayah perairan Indonesia tak pelak jadi penyebab maraknya penyelundupan narkoba di Indonesia.

Berdasarkan Survei Nasional penyalahgunaan narkoba pada 2017, kerugian biaya ekonomi yang terjadi akibat penyalahgunaan narkoba diestimasi mencapai Rp84,7 triliun. Jumlah ini terdiri dari biaya *private* yang meliputi biaya konsumsi narkoba, pengobatan sakit, overdosis, detoks dan rehabilitasi, hingga urusan yang terkait aparat penegak hukum dan penjara. Jumlah ini juga memperhitungkan kerugian biaya sosial yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba, meliputi *loss productivity*, *premature death*, dan tindak kriminal.

Potensi kerugian akibat daya rusak narkoba terhadap masa depan generasi bangsa juga tidak main-main. Survei yang dilakukan oleh BNN bersama Universitas Indonesia di 34 provinsi di Indonesia tersebut mencatat, penyalahguna terbesar adalah kalangan pekerja mencapai 59 persen, serta kalangan pelajar mencapai 24 persen.

Kepala Bagian Humas BNN Kombes Pol. Sulistiandriatmoko kepada Media Keuangan mengungkapkan, bahwa dalam menyelundupkan narkoba ke Indonesia, para sindikat narkoba telah mengetahui celah dan peta kelemahan Indonesia. Lebih jauh dia menyampaikan, Indonesia merupakan pasar potensial bagi para sindikat narkoba dengan tiga alasan utama. Alasan pertama, para sindikat

memahami betul besarnya permintaan (*demand*) Indonesia akan pasokan narkoba. “Akibatnya, berapapun banyaknya suplai narkoba yang disediakan, pasar Indonesia selalu bisa menyerapnya,” ungkapnya.

Terkait hal ini, Direktur Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, Heru Pambudi turut mengungkapkan tingginya harga narkoba di Indonesia tidak menjadi masalah bagi para pengguna, “Meskipun harganya melambung tinggi, permintaan narkoba di Indonesia sangatlah besar. Di Tiongkok, 1 gram sabu seharga Rp30 ribu, tiba di Malaysia menjadi Rp300 ribu, kemudian masuk pasaran Indonesia menjadi sekitar Rp1-1,5 juta,” ungkapnya.

Alasan kedua, kondisi geografis Indonesia yang didominasi wilayah perairan begitu luas dan terbuka. Hal ini membuat Indonesia begitu rentan terhadap penyelundupan. Ketiga, konsistensi penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Celaknya, hukuman mati tidak serta merta menyurutkan aksi para sindikat. Para tahanan narkoba masih bisa menggerakkan jaringannya. Meski hal itu dilakukan dari balik sel tahanan.

Terkait hal ini, Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia, Muhammad Mustofa, mengungkapkan terdapat skenario besar untuk melemahkan Indonesia. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh adanya kekhawatiran bahwa kelak Indonesia menjadi salah satu negara yang kuat dan besar secara ekonomi, industri, dan militer.

#### Jaga ketat jalur masuk

Celah masuknya narkoba dari luar negeri ke Indonesia melewati berbagai jalur. Pengawasan di wilayah perbatasan, sebagai pintu masuk utama dalam upaya penyelundupan narkoba, menjadi demikian vital dan mutlak diperlukan. Terkait hal ini, Mustofa menyampaikan, “Setiap pintu masuk baik udara maupun laut harus

terus-menerus diwaspadai. Khususnya jalur laut yang banyak dilakukan ke jalur tidak resmi.”

Senada dengan ini, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengamini bahwa jalur laut merupakan pintu masuk paling digemari para sindikat narkoba. “Dari data penindakan yang telah kami lakukan, sebanyak 80 persen narkoba masuk melalui jalur laut,” ungkapnya. Heru melanjutkan, pelabuhan-pelabuhan tikus yang minim pengawasan jadi sasaran empuk para sindikat. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa jalur darat dan jalur udara aman dari para penyelundup.

Sebagai salah satu penjaga perbatasan paling luar Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bekerja sama dengan para aparat keamanan lainnya terus memperketat pengawasan. Sepanjang 2018, DJBC gencar melakukan upaya penegahan narkoba dan barang berbahaya lainnya ke Indonesia. Hingga 30 November 2018, DJBC berhasil menggagalkan 392 kasus penyelundupan narkoba, psikotropika, dan prekursor (NPP).

Dari aksi tersebut, total barang berbahaya yang berhasil diamankan mencapai 4.136,59 kilogram. Jumlah ini mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya sebesar 2.222,19 kilogram. Dengan mengasumsikan bahwa 1 gram narkoba biasa digunakan oleh 5 orang pengguna. Maka, berdasarkan hasil penangkapan pada 2018, DJBC telah menyelamatkan generasi muda Indonesia hingga 20,68 juta orang.

#### Adu siasat

Ditjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengakui, para sindikat narkoba begitu terorganisir. Dalam sejumlah penangkapan yang dilakukan, tidak jarang para sindikat menggunakan perpaduan antara modus baru dan modus lama sehingga tidak mudah diketahui aparat.

Heru mengungkapkan beberapa modus yang biasa digunakan dalam menyelundupkan narkoba melalui jalur udara. “Diantaranya dengan *False concealment* (menyembunyikan narkoba di dalam barang), *body wrapping* (melekatkan narkoba di badan), atau *inserted* (narkoba dimasukkan ke dalam bagian tubuh),” sebut Heru.

Meski demikian, DJBC tidak kehabisan akal dalam melawan siasat para sindikat narkoba dalam menjalankan aksinya. Guna menjaga jalur laut, DJBC memperkuat sarana dan prasarana patroli laut, serta menambah jumlah personil. Bersama Kepolisian RI, TNI AL, Badan Keamanan Laut, serta aparat lainnya, sejumlah patroli laut gabungan terus dilakukan. Pada jalur udara, DJBC berwenang mengawasi dan memeriksa seluruh bandara udara di Indonesia. Sementara di wilayah perbatasan, kasus-kasus penyelundup narkoba banyak digagalkan. Sebut saja di perbatasan Timor Leste dengan Atambua, perbatasan Papua New Guinea dengan Skouw, perbatasan Malaysia dengan Aceh Tamiang dan Lhokseumawe, serta perbatasan Dumai dan Bengkalis.

Dalam menghadapi kejahatan lintas negara ini, DJBC secara intens melakukan komunikasi dengan Bea dan Cukai di berbagai negara, seperti Kastam Diraja Malaysia, China Customs, Hong Kong Customs and Excise Department, Australia Border Force, dan sebagainya. DJBC juga turut serta dalam Customs Enforcement Network (CEN), serta tergabung dalam dalam Regional Intelligence Liaison Office (RILO), sebuah organisasi jaringan intelijen yang terdiri dari administrasi pabean di seluruh dunia.

DJBC menyadari keselamatan jajaran petugas di lapangan menjadi taruhan. “Untuk itu, para petugas selalu dibekali dengan kemampuan-kemampuan yang mumpuni dalam mendeteksi gerak-gerik penyelundup, baik di bandara, pos perbatasan, pelabuhan, maupun saat melakukan penangkapan di laut. Mereka juga rutin berlatih karate untuk menjaga fisik agar tetap prima,” ungkap Heru. Dalam meningkatkan kualitas SDM, disediakan program pelatihan dan pendidikan, baik di Pusdiklat Bea dan Cukai, maupun di luar institusi yang ada di dalam dan luar negeri.

Selama menjalankan tugas, para petugas lapangan juga dibantu oleh pasukan Anjing Pelacak DJBC (K-9). Dengan indera penciuman yang tajam hingga tujuh kali lipat indera penciuman manusia, pasukan anjing K-9 memiliki andil besar dalam mendukung keberhasilan

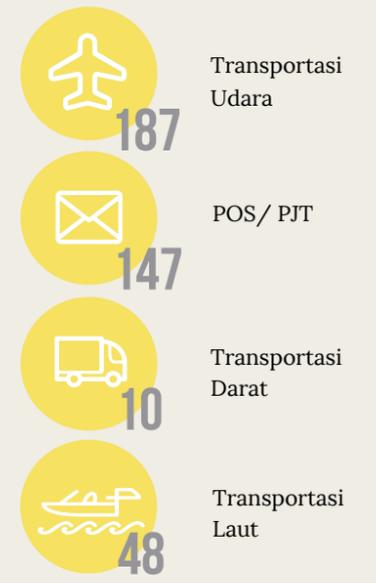
DJBC menggagalkan banyak penyelundupan narkoba. Pasukan anjing K-9 ini dilatih langsung di bawah Unit Pendidikan dan Pelatihan Anjing Pelacak DJBC. Saat ini, DJBC juga tengah melakukan pengembangan unit K-9 melalui Dog Marine Customs di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam.

Menghadapi gencarnya aksi penyelundupan, Heru menyebutkan, beberapa upaya yang kini tengah dilakukan DJBC dalam memperkuat penegahan narkoba dan barang ilegal, diantaranya melalui pengembangan sistem analisa dan *targeting* penumpang maupun container/kargo dalam sistem aplikasi yang digunakan DJBC. Dibentuk pula Pusat Komando dan Pengendalian (PUSKODAL).

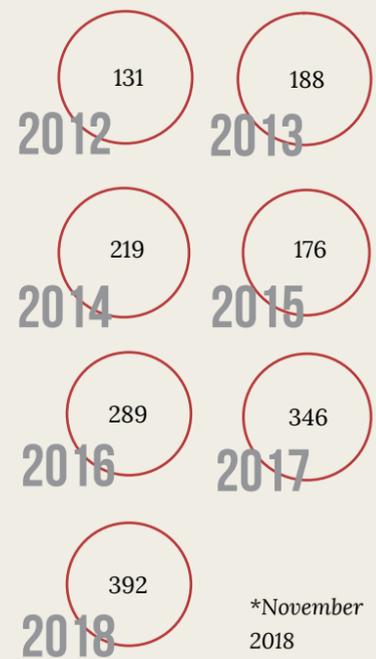
Selanjutnya, dilakukan utilisasi dan peremajaan sarana dan prasarana yang meliputi kapal patroli, alat pemindai narkoba, alat deteksi narkoba, dan sebagainya. Hal yang tidak kalah penting adalah sinergi dengan instansi penegak hukum dalam rangka Kebijakan Strategi Nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).

Terkait hal ini, Kepala Bagian Humas BNN Kombes Pol. Sulistiandriatmoko menegaskan perlunya kerja sama yang kuat dalam menganggunangi narkoba di Indonesia. “Jika seluruh aparat keamanan di Indonesia bersatu padu, belum tentu dapat memberantas habis para sindikat narkoba. Maka aparat keamanan tidak bisa bergerak sendiri. Koordinasi antar-aparat keamanan menjadi mutlak diperlukan”, ungkapnya.

#### Jenis Transportasi yang Digunakan



#### Penindakan NPP oleh DJBC (Kasus)



\*November 2018

# PENGHARGAAN TAHUN 2018

7/2

Media Keuangan Raih Gold Winner InHouse Magazine 2018.

29/3

Kemenkeu Pertahankan Trofi Platinum PR Indonesia Award 2018.

11/2

Menkeu Sri Mulyani Indrawati raih penghargaan Menteri Terbaik Dunia di World Government Summit, Dubai, Uni Arab Emirates (UAE).

11/4

Kemenkeu Raih Penghargaan pada Indonesia Content Marketing Award.

14/4

Menkeu Raih Penghargaan Sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik 2018 versi majalah FinanceAsia.

9/5

Menkeu Sri Mulyani Indrawati diapresiasi Sebagai Penggerak Ekonomi Digital dari Kata Data.

4-5/6

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga, dan aporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2017 Kembali Raih Opini WTP.

11/7

Kemenkeu Raih Penghargaan dalam BKN Award Tahun 2018.

7/8

Menkeu Mendapat Penghargaan Bintang Bhayangkara Utama.

30/8

DJP menerima penghargaan "Digital Transformer of The Year" dari International Data Corporation (IDC).

13/10

Menkeu Sri Mulyani Indrawati dinobatkan sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) terbaik Tahun 2018 versi majalah Global Markets.

9/10

"Golden World Award 2018" untuk kategori "Public Sector", diberikan oleh International Public Relations Association (IPRA) di Barcelona

5/11

Kemenkeu Raih Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018.

9/11

Menteri Keuangan Peroleh Penghargaan Best Communicators of The Year.

4/12

1. Juara Umum Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2018.
2. Juara pertama kategori website terbaik/pelayanan informasi melalui internet produk [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
3. Juara kedua kategori penerbitan media internal (in-house magazine) produk Media Keuangan.

5/12

1. Penghargaan Instansi dengan Penerapan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara) Terbaik Tahun 2018 kategori Kementerian/Lembaga.
2. Penghargaan sebagai Kementerian dan lembaga dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik tahun 2018
3. Penghargaan sebagai Kementerian dan Lembaga dengan nilai pelaporan gratifikasi terbesar yang ditetapkan menjadi Milik Negara
4. Juara ketiga kategori booth terbaik HAKORDIA 2018.

19/12

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Mentor



Dapatkan kemudahan layanan informasi publik dengan

# m-PPID

**Teman Transparansimu**

Unduh Sekarang di  dan segera di Appstore



Liputan Khusus

## Meramu Bekal Birokrat Milenial

Dominasi generasi milenial dalam persentase pegawai di Kementerian Keuangan semakin kuat. Pertanyaannya kemudian adalah mengenai kesiapan organisasi ini menyambut perubahan. Bisakah generasi yang menjunjung nilai kebebasan ini memberi wajah baru bagi dunia birokrasi?

**Foto**  
Agus Tri H.

Setelah moratorium selama dua tahun, penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) kembali dibuka pada semester kedua tahun 2017 lalu. Dalam rentang dua tahun tersebut banyak posisi pegawai negeri sipil (PNS) yang lowong, termasuk di Kementerian Keuangan.

Selama periode tersebut, pasokan pegawai baru di institusi ini mengandalkan lulusan Politeknik Keuangan Negara-STAN (PKN-STAN), itu pun harus dibagi-bagi persebarannya ke beberapa kementerian dan lembaga lain.

Karena itu, ketika keran penerimaan pegawai lulusan perguruan tinggi umum dibuka pertengahan 2017 lalu, animo dari masyarakat begitu besar. Saat itu kebutuhan pegawai di Kemenkeu tercatat sebanyak 7.718 orang dan tidak dapat dipenuhi hanya dari lulusan PKN-STAN. Sehingga, Biro Sumber Daya Manusia (SDM) harus mengajukan permohonan pengadaan pegawai lulusan D3 dan S1 di luar PKN-STAN. Setelah proses rekrutmen yang berjalan hampir enam bulan, 1.840 CPNS berhasil tersaring. Dari proses penerimaan tahun lalu, beberapa formasi jabatan belum berhasil terpenuhi secara maksimal. Sehingga, pada penerimaan tahun 2018 dipetakan kembali kebutuhan pegawai yang diisi oleh 4.881 CPNS lulusan PKN-STAN yang nantinya akan



**”Senior harus willing to share dan mengubah pola pikir mengenai atasan dan bawahan yang lebih egaliter, tidak bossy, open-minded, dan mau mendengar kemauan milenial. Tapi, milenial juga harus bisa mendengar dan tidak hanya berfokus pada keinginan pribadinya,”**

**Hadiyanto**  
Sekretaris  
Jenderal

ditambah 597 CPNS dari lulusan perguruan tinggi umum.

Tambahan wajah-wajah pegawai baru ini sekaligus menjadi penanda babak baru dalam pengelolaan SDM di Kementerian Keuangan. Kehadiran mereka semakin memperkuat dominasi milenial dalam persentase pegawai di organisasi ini. Dengan masuknya punggawa-punggawa keuangan muda dalam jajaran pegawai di Kementerian Keuangan, topik baru muncul ke permukaan. Hadirnya generasi milenial menjadi bahasan menarik dalam tiap forum dan ruang diskusi. Masuknya dominasi baru dari generasi ini perlu dilihat secara seksama sebagai kesempatan untuk mengembangkan organisasi Kementerian Keuangan. Agar peluang ini dapat dimaksimalkan untuk menjawab tantangan, usaha-usaha dalam pengelolaan sumber daya manusia ini pun mulai dipetakan.

#### **Mengenal tipikal milenial**

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto, memandang kehadiran generasi milenial sebagai warna baru dalam dunia birokrat. ”Mereka ini lebih terbuka dalam berpendapat serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi,” nilainya. Lebih dalam ia berpendapat bahwa generasi ini juga lebih berfokus pada *achievement*, *self-expression* dan *self-actualization*. Generasi yang lahir di tahun 1980 hingga 2000-an ini mendambakan lingkungan kerja yang mendukung *work life balance* dan apresiatif terhadap segala bentuk inovasi yang mereka berikan.

Bagi milenial, adanya ruang untuk berekspresi sangat dibutuhkan untuk bisa bekerja secara optimal. Hal tersebut memang sedikit menantang untuk lingkungan kerja birokrasi yang mau tidak mau dibatasi oleh beragam regulasi. ”Mereka ingin lebih ekspresif dalam menuangkan ide sesuai *passion*. Itu tidak salah, tapi bagaimanapun, *environment* bekerja di *public sector* itu berbeda dengan industri pada umumnya terkait dengan *confidentiality* informasi menyangkut

rahasia negara,” pesan orang nomor satu Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ini.

Kaum milenial memandang suatu pencapaian tidak hanya berupa *reward* berbentuk materi belaka. Menjadi bagian organisasi penting yang mengelola keuangan negara merupakan prestasi luar biasa. Hal tersebut merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan para pimpinan dan pengelola SDM dalam memotivasi para milenial. Dalam buku ”Generasi Langgas”, Yoris Sebastian membagikan pandangannya mengenai ikigai (motivasi untuk bangun tiap pagi). Bagaimana sebuah hal sederhana dapat memotivasi generasi muda ini untuk menjalani hari dan terus berkontribusi. Ketika *pride* dan *sense of belonging* terhadap organisasi berhasil ditanamkan ke para milenial, mereka akan lebih termotivasi dalam menjalani peran mereka dalam upaya membangun negeri.

#### **Mempertemukan pemahaman**

Meski lebih dari separuh jajaran pegawai di Kementerian Keuangan berasal dari golongan milenial, tidak dapat dipungkiri bahwa kursi-kursi pimpinan di lintas instansi Kementerian Keuangan masih diduduki oleh generasi-generasi sebelumnya. Kementerian Keuangan saat ini memiliki pegawai berjumlah 76.144 (data per Desember 2018) dengan komposisi pegawai dari generasi Y sebesar 43,39 persen dan generasi Z sebesar 16,67 persen. Hal ini merupakan sebuah tantangan bagi organisasi karena untuk mencapai sasaran atau tujuan organisasi diperlukan sinergi di seluruh pegawai dan upaya aktif dalam bekerja dari setiap pegawai.

Fakta tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa akan tercipta kesenjangan antargenerasi tersebut, khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara. Agar keniscayaan tersebut tidak berujung pada kenyataan, dalam pengelolaan sumber daya manusia yang baik memang perlu

dicermati karakteristik dari tiap generasi. Beda kelompok usia, penanganannya pun sedikit banyak memiliki kekhasan tersendiri.

Pada berbagai kesempatan, paparan mengenai pengenalan karakteristik antargenerasi ini terus disampaikan. Hal ini bertujuan agar setiap pegawai memiliki gambaran bagaimana mereka harus bersikap satu sama lain. Untuk itu, setiap pegawai sebaiknya memahami karakteristik setiap generasi sehingga dapat berinteraksi atau menyikapi perbedaan tersebut agar dapat tercipta interaksi yang harmonis antarpegawai. Saat menghadiri diskusi santai dalam acara Pembekalan Akhir CPNS Tahun Anggaran 2017,13 Desember 2018, Hadiyanto menekankan mengenai pentingnya sinergi lintas generasi ini. ”Senior harus willing to share dan mengubah pola pikir mengenai atasan dan bawahan yang lebih egaliter, tidak bossy, open-minded, dan mau mendengar kemauan milenial. Tapi, milenial juga harus bisa mendengar dan tidak hanya berfokus pada keinginan pribadinya,” pesannya.

Pemahaman mengenai perbedaan sifat dari generasi ini memang harus dimiliki oleh seluruh pihak, terutama bagi pengelola SDM di Kementerian Keuangan. Humaniasi, Kepala Biro SDM, memastikan jajarannya agar jadi garda terdepan dalam memahami isu lintas generasi ini. ”Sebagai pengelola SDM di Kementerian Keuangan, kami harus mampu menjadikan keanekaragaman generasi ini sebagai input pada proses perencanaan ataupun penyusunan kebijakan yang berlaku di Kemenkeu,” ujarnya. Kebijakan yang mendukung *work life balance* terus dikembangkan di lingkungan Kementerian Keuangan, contohnya penerapan *flexy-time*, *paternal leave* dan lainnya. Untuk mendukung dan mempermudah proses bisnis, beberapa terobosan berbasis teknologi turut diluncurkan, seperti sistem pengajuan cuti secara *online*. Itu semua disusun untuk mengakomodasi kebutuhan

pegawai dari berbagai generasi sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai untuk melaksanakan tugasnya sebagai ASN di Kementerian Keuangan dengan optimal.

#### **Pengembangan kesempatan**

Dalam semangat reformasi birokrasi yang terus didengungkan selama satu dekade terakhir, Biro SDM mulai menerapkan metode *human capital management* dalam mengelola *manpower* di Kementerian Keuangan. Metode ini dinilai paling relevan dengan visi organisasi, utamanya di poin kelima yaitu, ”menarik dan mempertahankan *talent* terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.” Selain itu, cara ini juga dianggap lebih memanusiasi manusia, karena SDM tak lagi hanya dianggap tenaga pendukung yang bersifat *cost center*. Kini, manusia dianggap sebagai aset kunci dan difokuskan untuk menciptakan *value added* bagi lingkungan tempat mereka bekerja.

Ketika manusia sudah dianggap sebagai suatu aset dalam sebuah organisasi, perlu ada langkah konkret dalam mendukungnya untuk berkembang dan menambah terus nilainya. Investasi besar perlu ditanam dalam pengembangan kompetensi SDM di Kementerian Keuangan. Komitmen dalam mendukung hal tersebut ditunjukkan dengan dibukanya kesempatan bagi para pegawai untuk melanjutkan sekolah, baik di dalam maupun luar negeri, melalui beragam skema beasiswa atau dengan menggunakan biaya sendiri. Tak hanya peluang meraih gelar dari pendidikan formal, para pegawai juga didorong untuk mengikuti pelatihan, *coaching* sesuai bidang yang diminatinya, serta dengan memberikan penugasan khusus pada instansi nasional dan internasional.

Beragam kesempatan untuk pengembangan kompetensi pegawai ini adalah bukti bahwa Kementerian Keuangan merupakan organisasi yang

dinamis dan adaptif. Selain itu, langkah tersebut juga salah satunya merupakan bentuk solusi dalam menghadapi karakter generasi milenial. Kaum muda ini sering dianggap kurang loyal dan mudah bosan, salah satu indikasinya adalah fenomena kutu loncat yang sering dilakukan milenial di industri luar. Merupakan sesuatu yang jamak ditemui di dunia milenial untuk berpindah dari perusahaan satu ke lainnya. Langkah tersebut diambil agar karier mereka cepat menanjak sekaligus *shortcut* dalam mencapai posisi yang mereka inginkan. Tidak salah memang, karena dalam melakukan hal tersebut juga bukan tanpa perjuangan dan pengorbanan.

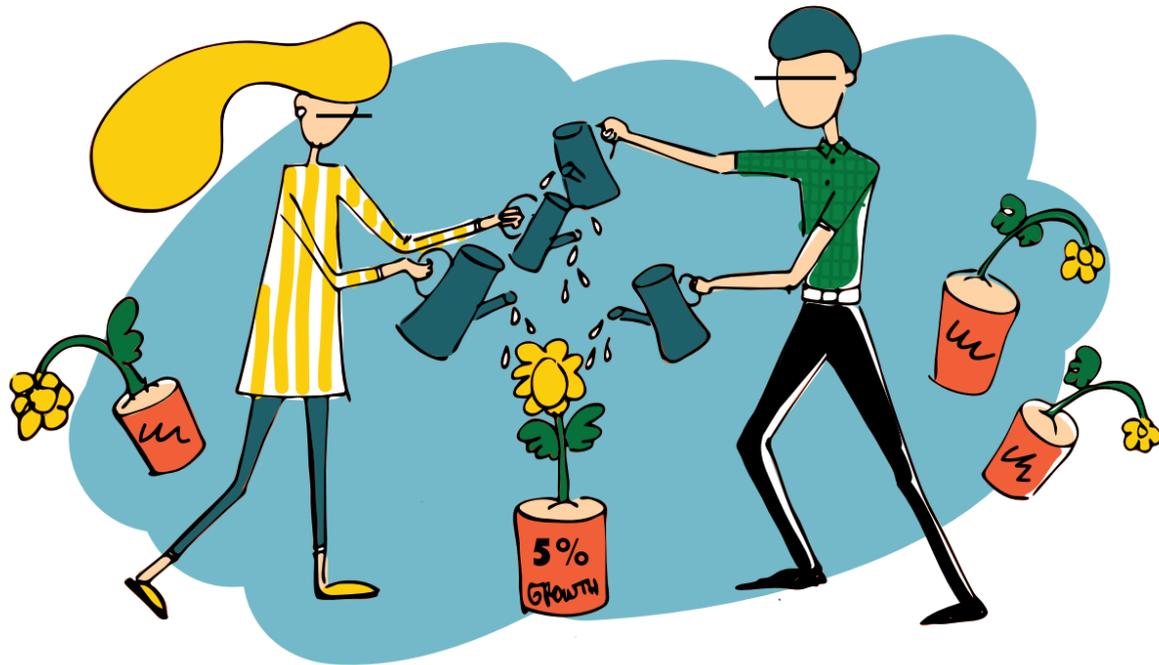
Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Keuangan terus menggodok program *leaders factory*. Ke depan, para pegawai memiliki kesempatan mengembangkan karir yang lebih luas. Kesempatan meniti karier bagi pegawai tidak hanya berfokus pada pola vertikal jabatan struktural, yang memang sangat terbatas ketersediaannya, tapi juga bisa menyasar pola horizontal dan diagonal. Hal tersebut diwujudkan dengan perluasan jabatan fungsional dan kerja sama dengan institusi lain di kementerian/lembaga lain. Pada akhirnya, program *leaders factory* kan benar-benar terbukti hasilnya apabila sumber daya manusia yang telah diberi investasi beragam kompetensi tersebut dapat benar-benar membuktikan kualitas mereka sebagai pemimpin di berbagai bidang karier yang mereka minati.

Terakhir, Sekretaris Jenderal menunjukkan dukungannya bagi generasi yang akan menjadi pemain utama dalam menggerakkan ekonomi nasional, ”Saya akan dorong betul milenial, bukan hanya mengakomodasi keinginan mereka, tetapi bagaimana keinginan tersebut dapat diwujudkan dalam prestasi yang nyata dalam mencapai tujuan organisasi.”

**Teks** Dimach Putra

# Tumbuh 5 persen: Gembira atau Masygul?

Andriansyah,  
Aparatur Sipil Negara, Badan Kebijakan Fiskal



Robert Lawrence, Profesor Perdagangan dan Investasi Internasional di Harvard University dalam *Annual International Forum on Economic Development* di Bali, Desember 2018 lalu mengatakan, Indonesia seharusnya gembira dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen, di tengah gejolak ekonomi global saat ini. Respons atas pernyataan ini bisa merujuk pada pernyataan ekonom terkemuka lainnya, Dani Rodrik, yaitu “*the correct answer to almost any question in economics is: it depends.*” Indonesia memang harus bergembira atas pencapaian tersebut, tapi

juga sewajarnya bersikap masygul.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga triwulan ketiga mencapai 5,2 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 (5,0%) dan 2017 (5,1%). Dibandingkan negara lain, seperti Amerika Serikat (AS) (3,0%), Eropa (1,6%), Turki (2,4%), Thailand (3,3%), dan Malaysia (4,4%), pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih baik. Ekskalasi perang dagang AS dan Tiongkok, pengetatan likuiditas global akibat normalisasi kebijakan moneter negara maju, serta penurunan aktivitas sektor riil global bertanggung jawab atas perlambatan pertumbuhan global. Maka, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia boleh disikapi perasaan gembira karena fundamental ekonomi cukup baik menahan gejala eksternal.

Solidnya konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, dan sehatnya pengelolaan fiskal berkontribusi positif dalam menjaga pertumbuhan ini. Indonesia juga ditopang oleh pertumbuhan

konsumsi rumah tangga karena jumlah penduduknya tertinggi ke empat di dunia. Selama permintaan domestik dipertahankan, pertumbuhan ekonomi minimal 5 persen dipercaya bisa terjaga. Pemerintah dan Bank Indonesia berperan menjaga tingkat harga yang stabil.

Percepatan pembangunan infrastruktur juga menunjang pertumbuhan investasi (pembentukan modal tetap bruto). Investasi pada mesin dan perlengkapan terus tumbuh tinggi, seiring pertumbuhan impor barang modal. Penyaluran kredit perbankan, terutama kredit modal kerja ke sektor konstruksi dan industri pengolahan, serta kredit investasi ke sektor pengangkutan, komunikasi, dan pertanian juga terus menguat. Namun kebijakan *stability over growth* ke depan akan tampak pada penurunan pertumbuhan kredit dan kegiatan investasi.

Solidnya fundamental ekonomi juga ditunjang pengelolaan fiskal yang sehat. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Oktober 2018 lebih baik dibandingkan 2017. Pendapatan dan belanja negara tumbuh lebih tinggi, dengan defisit keseimbangan primer dan defisit anggaran yang jauh lebih kecil. Rasio defisit APBN mencapai level terendah dalam lima tahun terakhir, sedangkan keseimbangan primer (nominal maupun rasio terhadap PDB) juga semakin baik sejak 2013. Realisasi penyerapan dan pertumbuhan belanja Pemerintah Pusat juga meningkat didukung pola penyerapan tanpa APBN Perubahan.

Meski demikian, sikap masygul atas pertumbuhan 5 persen juga layak dipahami. Ada dua hal yang mendasari hal ini. Pertama, lemahnya perdagangan dan investasi internasional, serta rendahnya keterlibatan Indonesia dalam *global value chain* (GVC). Peningkatan daya saing produk Indonesia akibat pelemahan rupiah tidak terlihat, sebab ekspor didominasi komoditas yang tingkat elastisitas permintaan terhadap harganya rendah.

Ekspor barang nonmigas tumbuh terbatas, sedangkan impor masih tinggi seiring permintaan domestik akan barang-barang nonmigas dan peningkatan kegiatan investasi.

Depresiasi rupiah belum mampu mengurangi tingginya permintaan barang impor, baik barang konsumsi, barang modal, maupun bahan baku. Akibatnya, defisit transaksi berjalan masih dalam karena pertumbuhan ekspor berada di bawah impor. Bahkan, tidak seperti dua tahun terakhir, surplus neraca transaksi modal dan finansial yang mencapai USD11,1 miliar pada triwulan ketiga, tidak mampu mengimbangi defisit transaksi berjalan sebesar USD22,4 miliar.

Selain itu, investasi asing langsung dalam penanaman modal asing (PMA) menjadi sebab utama defisit pendapatan primer, terutama karena pembayaran neto pendapatan investasi langsung. Hal ini tidak mengapa selama perusahaan PMA berorientasi ekspor, sehingga bisa membantu perbaikan neraca transaksi berjalan. Namun kenyataannya, perusahaan PMA yang ada lebih banyak berorientasi pada pemenuhan permintaan domestik.

Kedua, adanya indikasi diskonektivitas antara sektor keuangan dan sektor riil. Sektor keuangan hakikatnya adalah pelayan sektor riil. Pendalaman sektor keuangan perlu diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi riil. Selanjutnya, penguatan keterkaitan antara sektor keuangan dengan ekonomi riil perlu dilakukan, khususnya antara investasi dan pertumbuhan ekonomi. Penguatan dapat dilakukan dengan mendorong dana masyarakat yang dihimpun melalui penawaran publik di pasar modal untuk kegiatan investasi yang produktif. Insentif fiskal, berupa pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, untuk perusahaan yang menggunakan dana hasil penawaran umum untuk *capital expenditure* dapat dilakukan guna mendorong fungsi alokasi

sektor keuangan. Insentif pajak untuk mendorong program daur ulang aset (*asset recycling*) juga diperlukan. Insentif ini perlu dipertimbangkan karena dapat dikompensasi dengan potensi penambahan penerimaan pajak dari peningkatan keuntungan perusahaan di masa depan.

Kemasygulan juga perlu didudukan dalam konteks apakah angka pertumbuhan 5 persen merupakan titik optimal? Analisis internal BKF menunjukkan perekonomian Indonesia telah mendekati potensinya. Dekomposisi pertumbuhan dengan *growth accounting* juga menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan Indonesia lebih didominasi peran modal, sejalan dengan naiknya kontribusi investasi terhadap PDB. Meski dominan, mayoritas adalah modal *non-information and communication technology* (ICT), sedangkan modal ICT relatif rendah dan menurun. Selanjutnya, kontribusi tenaga kerja relatif mengalami penurunan seiring perlambatan laju pertumbuhan populasi. Artinya, *total factor productivity* cenderung menurun yang mengindikasikan rendahnya penguasaan teknologi dan efisiensi produksi.

Maka, upaya reformasi struktural untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan harus didorong untuk peningkatan sisi penawaran, terutama kapasitas produksi. Program pengembangan sumber daya manusia melalui penguasaan teknologi dan efisiensi produksi juga mendesak dilakukan. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi hanyalah indikator. Obsesi berlebihan terhadap *growth* bisa menyesatkan karena meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh indikator kesejahteraan masyarakat. Hal terpenting adalah kualitas pertumbuhan ekonomi dan membaiknya kesejahteraan masyarakat dengan semakin kecilnya tingkat kesenjangan, kemiskinan, dan pengangguran.

\*Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.

# APBN: Menjaga Momentum Pertumbuhan Saat Volatilitas Global

Hidayat Amir,  
Plt. Kepala Pusat Kebijakan APBN

Tahun 2018 diwarnai oleh volatilitas global. Mulai dari normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat, semangat proteksionisme dan perang dagang, fluktuasi harga minyak, *rebalancing* ekonomi Tiongkok, hingga memanasnya tensi geopolitik.

Didorong oleh menguatnya perekonomian Amerika Serikat, The Fed melakukan akselerasi kenaikan tingkat suku bunga sepanjang 2018. Hal ini mengakibatkan pelemahan mata uang *emerging market* termasuk Indonesia.

Akibatnya, proyeksi pertumbuhan global pun mengalami koreksi. Rilis IMF pada Sidang tahunan IMF-Bank Dunia di Bali mengoreksi pertumbuhan ekonomi global dan volume perdagangan dunia ke bawah.

Dalam dinamika seperti ini, risiko ketidakpastian dalam pelaksanaan APBN 2018 jadi meningkat. Pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Indonesia bersyukur memiliki pengalaman yang kaya sehingga institusi kebijakan moneter dan fiskal dapat bekerja

sama secara sinergis. Otoritas moneter mengambil inisiatif kebijakan stabilisasi dengan prinsip antisipatif. Sementara, otoritas fiskal mengamini kebijakan *stability over growth* dengan menjaga momentum pertumbuhan dan kesehatan fiskal.

Pemerintah memperkuat bauran kebijakan moneter, fiskal dan sektor riil untuk mengimplementasikan arah kebijakan *stability over growth* tersebut. Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga acuan 7DRR sampai enam kali sepanjang 2018.

Beberapa langkah konstruktif yang diambil diantaranya: mempercepat penerapan kandungan *mandatory biodiesel* B20, peningkatan kandungan lokal dalam proyek infrastruktur, meningkatkan tarif PPh Impor 1.147 komoditas barang konsumsi, memperkuat skema fasilitas *tax holiday*, memperkuat skema devisa hasil ekspor, dan mengimplementasikan *Online Single Submission* dalam perijinan usaha.

Dengan bauran kebijakan ini, maka dampak volatilitas global kepada perekonomian domestik dapat diredam. Momentum pertumbuhan juga masih terjaga meski dengan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dibanding ekspektasi sebelumnya.

Dari berbagai indikator ekonomi dalam APBN 2018, nilai tukar dan harga minyak di pasar internasional mengalami volatilitas cukup besar. Sisanya, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga SPN 3 bulan, serta *lifting* minyak dan gas mendekati angka asumsi yang ditetapkan.

Nilai tukar dalam penyusunan APBN 2018 ditetapkan sebesar Rp13.400 per dolar Amerika Serikat. Realisasinya sempat berfluktuasi sampai Rp15.200 pada bulan Oktober, sebelum

kembali menurun ke level Rp14.000-an. Rata-rata nilai tukar sampai dengan akhir 2018 diperkirakan di level Rp14.250-an.

Harga minyak ICP juga berfluktuasi, sempat bertengger di atas USD70 per barel, sebelum kembali turun di level USD60-an per barel. Padahal dalam asumsi APBN, ICP ditetapkan hanya sebesar USD48 per barel. Kondisi ini tentu mempengaruhi postur APBN yang terkait dengan harga minyak dan nilai tukar, baik dalam komponen pendapatan maupun belanja negara.

Hal yang paling menonjol di sisi pendapatan negara adalah penerimaan SDA, terutama migas, mengalami kenaikan signifikan. Penerimaan SDA yang dipatok sebesar Rp103,7 triliun realisasinya diperkirakan akan menembus angka Rp175 triliun atau hampir 170 persen dari APBN.

Namun di sisi lain, belanja pemerintah juga merevisi parameter subsidi tetap solar dari sebesar Rp500 per liter menjadi Rp2.000 per liter. Konsekuensinya, belanja subsidi energi diperkirakan membengkak, dari Rp94,5 triliun

menjadi Rp155 triliun.

Langkah ini ditempuh pemerintah agar volatilitas harga di pasar internasional tidak sepenuhnya mempengaruhi perubahan harga di dalam negeri. Hal ini untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama dari golongan tidak mampu.

Di luar gejolak nilai tukar dan harga minyak, kinerja penerimaan perpajakan juga sangat menggembirakan. Tiga komponen terbesar yakni PPh nonmigas, PPN, dan PPh migas tumbuh sangat baik. Sampai akhir tahun PPh nonmigas diperkirakan tumbuh di atas 18 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya di level 13 persen.

PPN melanjutkan tren pertumbuhan tahun lalu di level 13 persen, walau pun ada kebijakan percepatan proses restitusi. PPh migas juga tumbuh sangat tinggi, mencapai di atas 25 persen, selaras dengan kenaikan harga ICP.

Penerimaan dari kepabeanan dan cukai pun tumbuh menggembirakan.

Kinerja positif ini memastikan bahwa *tax ratio* 2018 akan tumbuh sekitar 11,6 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 10,7 persen.

Kinerja belanja pun menggembirakan. Penyerapan anggaran menunjukkan

realisasi yang lebih baik dari tahun lalu. Dengan reformasi fiskal yang menyentuh baik alokasi belanja maupun implementasinya, harapannya kualitas belanja dapat terus ditingkatkan.

Implementasi konsep *value for money* dapat terus ditingkatkan secara masif, tidak hanya di level Kementerian/Lembaga, tetapi juga di level pemerintah daerah. Ini prasyarat penting agar setiap belanja negara dapat menghasilkan kinerja dan dampak yang baik bagi perekonomian.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan, kondisi makro-fiskal dapat dijaga momentum pertumbuhannya. Realisasi defisit APBN 2018 juga diperkirakan akan lebih rendah dari angka APBN (2,19 persen PDB) yaitu di angka sekitar 1,8 persen PDB.

Hal ini juga berarti keseimbangan primer akan mendekati positif dan pembiayaan anggaran baik dari utang maupun nonutang mengalami penurunan. Dalam kondisi ini maka APBN semakin sehat dan *sustainable*, sebagai modal penting untuk implementasi APBN tahun depan.

\*)Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.

# Perkuat Sinergi Dorong Perekonomian yang Solid dan Berkesinambungan

**Josua Pardede,**  
Vice President-Economist PT. Bank Permata, Tbk.

**K**inerja perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2018 tidak terlepas dari dinamika ekonomi global yang disertai ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2018 cenderung melandai dan tidak konvergen dimana ekonomi Amerika Serikat (AS) tumbuh kuat pada 2018. Namun demikian, perekonomian Eropa, Jepang dan Tiongkok cenderung melambat. Ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi oleh eskalasi perang dagang antara AS dan Tiongkok serta berlanjutnya normalisasi kebijakan moneter bank sentral AS juga turut berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi global. Sementara itu, peningkatan aktivitas ekonomi domestik termasuk konsumsi dan investasi berkontribusi pada meningkatnya defisit transaksi berjalan tahun 2018.

Di tengah perkembangan ekonomi global yang tidak kondusif tersebut, kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2018 terus menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan ekonomi pada tiga kuartal tahun 2018 mencapai 5,17 persen year-on-year (yoy), mendekati prognosis Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yakni 5,2 persen yoy. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi ditopang oleh

konsumsi rumah tangga yang tumbuh sekitar lebih besar dari 5 persen secara kumulatif sejalan dengan peningkatan bantuan sosial Pemerintah dan terkendalinya tingkat inflasi sehingga mendukung daya beli masyarakat. Selain konsumsi rumah tangga, perekonomian domestik juga ditopang oleh peningkatan laju Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di kisaran 6,9 persen secara kumulatif dalam tiga kuartal tahun laporan.

Meskipun demikian, kontribusi net ekspor cenderung terkontraksi dikarenakan laju pertumbuhan ekspor yang lebih rendah dari pertumbuhan impor. Terbatasnya laju pertumbuhan ekspor dipengaruhi oleh penurunan aktivitas industri manufaktur dari mitra dagang utama serta penurunan harga komoditas ekspor yakni kelapa sawit sejak semester II tahun 2018. Sementara itu, di sisi lainnya, impor mencatatkan pertumbuhan yang cenderung tinggi terutama impor barang modal dan bahan baku sejalan dengan upaya pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia.

Kinerja perekonomian yang baik juga ditunjukkan dengan realisasi inflasi sepanjang tahun 2018 yang tetap terkendali. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-November) 2018 tercatat 2,5 persen lebih rendah dari asumsi inflasi pada APBN 2018 yakni 3,5 persen, serta lebih rendah dari inflasi periode yang sama pada tahun 2016 dan 2017. Terkendalinya inflasi didukung oleh penguatan koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi dan mendorong stabilitas rupiah sedemikian sehingga dampak depresiasi nilai tukar pada inflasi cenderung terbatas.

Di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, nilai tukar rupiah cenderung bergerak dinamis sepanjang tahun 2018 ini. Realisasi rata-rata nilai tukar rupiah hingga 7 Desember 2018 mencapai Rp14.229 per dolar AS, cenderung lebih tinggi dari asumsi nilai tukar pada APBN 2018 yakni Rp13.400 per dolar.

Penguatan dolar AS terhadap sebagian besar mata uang negara berkembang dipengaruhi oleh pengetatan kebijakan moneter bank sentral AS. Selain faktor eksternal, pelebaran defisit transaksi berjalan pada tahun 2018 juga turut memberikan tekanan pada pasar keuangan domestik. Dalam merespons perkembangan keseimbangan eksternal Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain 1) implementasi penggunaan Biodiesel (B-20) dalam rangka mengurangi impor bahan bakar solar; 2) meninjau proyek-proyek infrastruktur yang memiliki konten impor yang besar, dan 3) mengeluarkan kebijakan Pajak Penghasilan terhadap barang

konsumsi impor dalam rangka mendorong penggunaan produk domestik. Bauran kebijakan Pemerintah tersebut diharapkan dapat menekan defisit transaksi berjalan dalam jangka pendek, sehingga dapat mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Kondisi perekonomian global yang tumbuh tidak merata juga telah mendorong fluktuasi harga minyak dunia juga turut mempengaruhi harga minyak mentah Indonesia. Harga minyak mentah Indonesia tercatat US\$69,2

per barel hingga bulan Oktober 2018, lebih tinggi dari asumsi pada APBN yakni di level US\$48 per barel. Realisasi harga minyak mentah yang lebih tinggi dari asumsi mendorong pencapaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 31 Oktober 2018 yang tercatat 114,5 persen dari target APBN. Perbaikan realisasi PNBP juga diikuti oleh peningkatan penerimaan perpajakan yang mencapai 71,7 persen dari target. Sementara di sisi belanja, penyerapan serta



pertumbuhan belanja pemerintah pusat cenderung baik. Dengan demikian, defisit APBN hingga Oktober 2018 tercatat 1,6 persen terhadap APBN, terendah sejak tahun 2014. Sejalan dengan optimalisasi penerimaan negara serta pengelolaan utang yang *prudent*, keseimbangan primer juga menunjukkan tren yang positif. Meskipun masih tercatat defisit Rp23,8 triliun, namun merupakan defisit terendah sejak tahun 2013. Secara keseluruhan, di tengah dinamika global dan domestik, kinerja APBN 2018 menunjukkan peningkatan yang menunjukkan pencapaian yang baik dari Pemerintah.

Ke depan, prospek ekonomi domestik diperkirakan akan terus membaik didukung oleh implementasi reformasi struktural yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabil. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 diperkirakan melandai sebagai akibat secara khusus pertumbuhan ekonomi AS yang diperkirakan lebih rendah dengan mempertimbangkan efek pelonggaran kebijakan fiskal AS yang cenderung normal kembali, serta dampak dari pengetatan kebijakan moneter bank sentral AS.

Meskipun pertumbuhan ekonomi global cenderung melandai, namun perekonomian Indonesia tahun 2019 diperkirakan akan tetap tumbuh solid di kisaran 5,1 persen dengan ditopang oleh ekspektasi konsumsi rumah tangga yang tetap tumbuh >5 persen dan didukung oleh inflasi yang terkendali di kisaran 3,5 persen serta penciptaan lapangan kerja di sektor riil. Selain itu, investasi diperkirakan

akan tetap menjadi kontributor terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga, mengingat laju investasi tahun 2019 akan ditopang oleh penyelesaian pembangunan infrastruktur serta ekspektasi perbaikan sentimen investasi sektor swasta.

Namun demikian, perekonomian domestik masih akan tetap menghadapi tantangan ekonomi global yang masih bersumber dari ketidakpastian perang dagang yang dapat menekan volume perdagangan global. Meskipun normalisasi diperkirakan akan tetap berlanjut tahun 2019, namun kenaikan suku bunga AS diperkirakan hanya sebesar 25-50 basis poin (bps) mempertimbangkan ekspektasi penurunan ekonomi AS pada tahun depan. Kondisi keseimbangan eksternal Indonesia diperkirakan akan semakin membaik dimana defisit transaksi berjalan akan menurun ke level yang lebih sehat sehingga mendukung stabilitas nilai tukar rupiah di tahun mendatang.

Arah kebijakan fiskal diperkirakan tidak hanya akan memperkuat pertumbuhan, namun juga menjaga stabilitas perekonomian yang tercermin dari APBN 2019 yang sehat, adil, dan mandiri. Optimalisasi penerimaan perpajakan sejalan dengan perbaikan sektor-sektor riil dengan tetap menjaga iklim investasi dan dunia usaha diperkirakan akan mendorong peningkatan penerimaan negara. Namun demikian, tantangan penerimaan negara akan datang dari tren penurunan harga minyak dunia serta harga komoditas ekspor yang akan berpengaruh langsung pada PNBK.

Sementara itu, peningkatan produktivitas dan efektivitas belanja negara akan tetap mendukung daya saing ekspor, perbaikan investasi serta peningkatan jasa produktif. Dengan demikian, defisit APBN 2019 diperkirakan akan mencapai kurang dari 2 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dalam menghadapi tahun 2019, Pemerintah perlu terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan semua pelaku ekonomi dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang solid dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

\*)Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.

## Tidak Hanya Bermodal Passion

Foto  
Anas Nur  
Huda

Jangan percaya jika ada yang bilang *kerja cukup dengan passion*. Sebab di Indonesia, bermodal *passion* saja tidak cukup. *Passion* tanpa modal finansial, manajemen yang baik, serta *marketing* yg tepat hanya akan membawamu menuju kelelahan tanpa hasil.

*Tapi kan ada pekerjaan yang memang membutuhkan passion besar buat sukses.*

Benar. Namun di belakang, mereka didukung oleh manajemen yang bagus. Misal saja, seorang Zlatan atau Messi. Saya meyakini, mereka bermain bola *fully passionate*. Sukses besar dan berpenghasilan miliaran. Namun jangan lupa, Zlatan dan Messi bermain bola di sebuah klub dengan manajemen profesional. Pada liga terbaik dengan marketing luar biasa. Bayangkan bila keduanya bermain di MU atau Madura United. Apakah bisa sesukses sekarang? Belum tentu.

Contoh lain, Film Merantau (2009) yang disutradarai Gareth Evans. Dibuat

dengan *passion* tinggi dan tujuan mulia, yaitu untuk mengangkat beladiri silat. Pemainnya pilihan, yaitu atlet silat yg diminta belajar akting. Gareth mengajak Iko Uwais yg atlet silat dan Yayan Ruhian yg sehari-harinya pelatih silat, beserta dua aktor asal Denmark. Hasilnya, secara kualitas cukup bagus. Namun, ketika dirilis di bioskop Indonesia, hasilnya sepi penonton. Hanya bertahan di layar sekitar 1-2 minggu.

Akhirnya, Merantau dibawa Gareth ke festival-festival film di luar negeri. Tak disangka, sambutannya begitu bagus. Merantau diputar di festival di Tokyo, Toronto, Sidney, dan Amerika. Barulah penonton Indonesia tertarik, sayangnya Merantau tidak lagi tayang di Indonesia.

Berikutnya, Gareth membuat film baru, yaitu The Raid (2012). Sama dengan Merantau, ia dibuat dengan *passion* dan dedikasi untuk memperkenalkan silat ke dunia. Dengan *cast and crew* yang sama, tetapi strategi *marketing* berbeda. Gareth menyadari penonton Indonesia itu luar

negeri *minded*. Maka, setahun sebelum rilis, pada 2011 The Raid dibawa ke luar negeri, ditayangkan di berbagai festival. Tanggapannya luar biasa. The Raid meraih berbagai penghargaan. Kritikus film asing dari berbagai media terkemuka memuji film ini. Riviu positif berseliweran di *social media* dan website. Tanpa pikir panjang, Sony Pictures membeli hak siarnya untuk ditayangkan secara luas dan komersial di Amerika dan Australia. Bahkan, musik latar untuk pasar internasional diaransem ulang.

Bisa ditebak, saat dirilis resmi di Indonesia pada 2012, hasilnya penonton membludak. Antre untuk melihat film aksi beladiri lokal. Momen yang jarang terjadi.

Maka, bukan berarti *passion* tidak penting. Namun, jangan lupa pentingnya manajemen dan *marketing*. *Passion* tanpa kedua hal itu hanya akan menghasilkan karya idealis tanpa hasil ekonomis. Capek pasti, hasil ekonomis belum tentu.

Teks Hafiz Yusuf



## Menikmati Sate Kerbau di Pantura Timur

Jika anda melakukan perjalanan ke Surabaya dari arah Semarang melalui jalan darat, atau sebaliknya, tidak ada salahnya untuk mampir sejenak di Kota Kudus. Kota kecil di Provinsi Jawa Tengah tersebut mempunyai beberapa kuliner andalan, salah satu yang patut dicoba adalah sate kerbau.

Kedengarannya memang agak asing. Sebab, di berbagai daerah di Indonesia, lazimnya sate diolah dari daging ayam, kambing, atau sapi. Contohnya saja, jenis sate Madura, sate klathak, atau sate padang yang sering kita temui.

Alkisah, dalam proses interaksi budaya dan religi antara masyarakat lokal dan pendatang pada abad 16, Sayyid Ja'far Shodiq atau yang dikenal dengan Sunan Kudus, sangat mengedepankan prinsip toleransi. Maksudnya adalah agar tidak terjadi benturan dengan nilai masyarakat lokal yang sudah mapan.

Masyarakat Kota Tajug, nama Kota Kudus pada waktu itu, sebagian besar adalah pemeluk agama Hindu. Mereka memberi perlakuan spesial pada sapi. Oleh karena itu, Sunan

Kudus melarang para pengikutnya untuk menyembelih hewan tersebut di Kota Kudus, sebagai bentuk penghormatan atas nilai lokal tersebut.

Mengingat pengaruh Sunan Kudus yang cukup kuat, para pengikutnya kemudian beralih ke daging kerbau. Tradisi tersebut masih diteruskan secara turun temurun sampai sekarang. Masyarakat Kudus tetap tidak menyembelih sapi, sebagai bentuk penghormatan kepada Sunan Kudus yang telah berjasa mengajarkan nilai-nilai budaya dan religi kepada mereka.

Tidak mengherankan jika kini sate kerbau sangat populer dan berkembang menjadi kuliner khas Kudus, selain garang asem dan soto. Warung sate kerbau mudah dijumpai di berbagai sudut kota, tak ubahnya mencari cari gudeg di seputar Yogyakarta. Namun diantara semua warung, dua tempat yang menjadi rujukan utama, yakni Sate Kerbau Menara yang terletak persis sebelah kanan Masjid Menara Kudus, dan Sate Kerbau Min Jastro di Ruko H. Agus Salim.

Kedua warung tersebut sudah berdiri sejak lama dan sekarang sudah masuk dalam pengelolaan generasi ketiga. Tokoh seperti Bondan Winarno dan Megawati Soekarnoputri sudah pernah mencicipi nikmatnya sate kerbau di kedua warung itu. Begitu juga dengan perusahaan level nasional seperti PT. Djarum pernah masuk dalam daftar pemesan untuk keperluan acara di internal mereka.

Jangan bayangkan daging kerbau itu alot atau susah dikunyah. Sate kerbau yang mereka sajikan cukup empuk dan mudah dikonsumsi. Sebelum diolah, daging kerbau sudah dipilah-pilah dari ototnya. Selain itu, daging yang digunakan adalah bagian punggung sampai paha bagian belakang yang menurut mereka memang lebih mudah empuk.

Sate kerbau tersebut dapat dinikmati dengan kuah bumbu sambal kacang yang diolah dari air cabe, air kentang yang dicampur dan ditumbuk bersama kacang dan serundeng (parutan kelapa sangrai). Rasanya manis, gurih, pedas, dan juga "nendang".

Saat dikunyah, tekstur daging kerbau sendiri tidak terasa berbeda dengan daging sapi.

Untuk Warung Sate Kerbau Menara, penyajian dilengkapi dengan sop daging kerbau seukuran mangkuk khas penyajian soto kudus. Baru mencium wangi asapnya saja, saya sudah merasa keroncongan.

Jam operasi warung sendiri dimulai pukul 17.00 - 21.00, namun bisa tutup lebih awal apabila persediaan habis. Seporsi sate dihargai Rp34ribu - Rp45ribu. Harga yang terbilang sepadan dengan petualangan lidah yang ditawarkan.

Teks dan foto Izzul Muna, Pegawai Sekretariat Jenderal



## Meminjam Mata Na Willa untuk Melihat Dunia

ini memiliki konsekuensi yang sulit dihindari: makin dewasa, umumnya orang akan makin membosankan.

Membaca cerita *Na Willa* membawa kita kembali ke masa kanak-kanak, di mana dunia masih begitu sederhana dan kita tidak dituntut untuk membuat pilihan yang rumit. Kita juga diingatkan kembali bahwa melihat dunia melalui mata anak kecil yang lugu dan tidak banyak pertimbangan kadang membuat hidup jadi lebih menarik untuk dijalani. Dalam buku *Na Willa: Serial Catatan Kemarin*, kita akan dibawa mengikuti kisah sehari-hari Willa, keluarga dan teman-temannya. Salah satu bagian paling berkesan adalah saat Dul, teman Willa, tertabrak kereta pada Bab *Kereta Lewat* dan kakinya buntung. Setelahnya ia harus memakai kaki palsu. Saat menjenguk Dul, Ibu Willa tak mampu menahan tangis melihat Dul dan Willa mengetuk-ngetuk kaki palsu Dul sambil menyanyi tanpa beban. Dul mungkin kehilangan kakinya, namun ia tidak kehilangan daya hidupnya. Nasib buruk boleh menghantamnya di usia sangat muda, namun daya tahan yang ia punya akan menyelamatkannya dari perasaan putus asa. Sangat mungkin setelahnya ia akan kembali bermain-main di dekat rel kereta, namun dengan lebih hati-hati. Seseorang pernah berkata pada saya, di dunia ini, mungkin, tak ada yang lebih penting ketimbang daya tahan. Terkadang kita—orang dewasa—perlu meminjam mata kanak-kanak untuk meyakinkan diri bahwa hidup akan jadi terlalu membosankan untuk dijalani dengan penuh ketakutan.

Peresensi: Saira Rezcan

**P**erilaku apa yang dapat diasosiasikan dengan kedewasaan dan sifat kekanakan? Meski jawaban atas pertanyaan tersebut bisa jadi sangat beragam, namun satu poin yang biasanya menonjol adalah: orang dewasa jauh lebih hati-hati dan banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan, sedangkan anak-anak lebih berani karena belum banyak pengalaman. Orang dewasa memahami betul konsep risiko dan konsekuensi. Maka untuk setiap keputusan yang ia buat—besar maupun

kecil—umumnya akan dihitung terlebih dahulu besaran risiko dan konsekuensinya. Kehati-hatian khas orang dewasa tersebut tak jarang menjelma menjadi ketakutan berlebih atas sesuatu, hanya karena hal tersebut pernah menimbulkan perasaan tak menyenangkan di masa lalu. Misalnya, pengalaman patah hati akan membuat seseorang lebih berhati-hati dalam memilih pasangan di masa depan, atau bahkan memilih untuk tidak berpasangan lagi karena tidak ingin merasakan kembali rasa sakit yang pernah ia alami. Pola seperti

## Mas Praim

Cerita : Dimach Putra

Gambar : Bimo Adi





**HARI LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA  
10 JANUARI 2018**

Foto  
Adhi Kurniawan



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**